

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LAKIP) TAHUN 2020



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI BENGKULU**



KATA PENGANTAR



Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan **Provinsi Bengkulu Tahun 2020 ini merupakan** laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu menuju good governance dengan mengacu pada Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2016-2021. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengacu pada

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) ini menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik

Sebagai gambaran keberhasilan dan ketidak tercapaian misi dan tujuan organisasi serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu menyusun (LAKIP) yang. Diharapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemangku kepentingan, khususnya bagi semua unit kerja yang ada untuk meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang.

Bengkulu, Februari 2021
Plt. Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Provinsi Bengkulu

SURYA OFIANA, SE. M.Si

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19671012 199203 2 001



RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu merupakan instansi Pemerintah Daerah yang diberikan tugas, tanggung jawab dan amanah untuk melaksanakan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan dibidang industri dan perdagangan. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam RPJMD Provinsi Bengkulu 2016-2021, Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu 2016-2021, Rencana Kerja dan Penetapan/Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun 2020.

Peran strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu dalam pembangunan ekonomi Bengkulu adalah meningkatkan daya saing industri dan peningkatan perdagangan dalam rangka menopang pertumbuhan ekonomi Bengkulu.

Sebagai Instansi yang bertugas membina dan mengembangkan sektor industri dan perdagangan telah mampu menjalankan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya. Hal ini tampak pada pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020, secara umum telah memenuhi target yang ditetapkan, walaupun masih terdapat beberapa Indikator Kinerja Utama yang belum mencapai target.

Pencapaian atau realisasi terhadap target indikator kinerja utama (IKU) pada tahun 2020 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Sasaran ke-1: Dalam upaya meningkatnya kontribusi sub sektor industri terhadap perekonomian daerah diarahkan pada peningkatan jumlah unit usaha industri sedang besar dan IKM dan peningkatan jumlah wirausaha baru. Capaian kinerja sasaran ke-1 mendapat predikat dengan capaian rata-rata pada kategori baik dengan rata-rata persentase capaian 96,66 persen. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran sasaran ke-1 melalui indikator, Persentase kontribusi sub sektor industri terhadap PDRB dengan kategori baik.
2. Sasaran ke-2: Dalam upaya meningkatkan kontribusi sub sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah diarahkan pada peningkatan unit usaha perdagangan dan peningkatan kontribusi sektor perdagangan dalam negeri terhadap perekonomian daerah. Capaian kinerja sasaran ke-

2 mendapat predikat dengan capaian rata-rata pada kategori sangat baik dengan rata – rata persentase capaian 96,62 persen. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran melalui indikator dengan kategori baik.

3. Sasaran ke-3: Dalam upaya meningkatnya capaian kinerja OPD tahun 2020 melalui nilai Sakip Disperindag yang mendapat predikat BB dengan capaian rata-rata pada kategori “Baik” Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran indikator Nilai SAKIP Disperindag, dengan kategori baik.

Terkait dukungan anggaran dalam rangka mendukung pencapaian sasaran tersebut diatas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu melaksanakan Program dan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2020 terdiri dari : Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 9.787.377.568 (Sembilan Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp9.172.242.867,- (Sembilan Milyar Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) atau sebesar 93,71 persen. Sedangkan untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 3.787.569.299,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp 3.521.086.617,- (Tiga Milyar Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tujuh Belas Rupiah) atau sebesar 92,96 persen.

Beberapa faktor keberhasilan yang menunjang pencapaian sasaran kinerja tahun 2020 diantaranya sebagai berikut:

ASPEK KELEMBAGAAN:

- a. Pada tahun 2019 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu melakukan review Renstra dalam rangka pemetaan ulang IKU OPD sebagai alat ukur kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu. Penilaian terhadap kinerja manajemen yang lebih optimal dalam mendukung pelaksanaan urusan perindustrian dan perdagangan di Provinsi Bengkulu. Program-program dilaksanakan oleh Sekretariat untuk menjamin lancarnya kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Bengkulu. IKU ini didukung program-program rutin perkantoran, dimana selama tahun 2020 operasional pelayanan kantor berjalan secara lancar, yang dapat dibuktikan dengan pencapaian IKU lainnya secara baik.
- b. Jumlah Dokumen Perencanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu, Dokumen perencanaan bagi instansi Pemerintah termasuk Dinas Perindag Prov. Bengkulu memiliki fungsi yang sangat vital. Dokumen dimaksud bukan lagi sekedar untuk pengklasifikasikan mata kegiatan dan anggaran, tetapi juga memiliki legalitas sebagai dasar hukum bagi instansi pemerintah untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Dengan demikian, dukungan terhadap penyusunan dokumen-dokumen tersebut perlu mendapatkan perhatian yang serius. Setiap tahun Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu menyusun dua jenis Dokumen perencanaan yaitu Rencana Kerja (Renja) OPD dan dokumen Rencana Kegiatan Anggaran (RKA)

URUSAN PERINDUSTRIAN:

- a. Jumlah sentra industri yang dibina pada tahun 2020 sejumlah 14 Sentra walau saat ini sebagian berhenti berproduksi karena menurunnya permintaan pasar yang disebabkan karena adanya wabah virus covid 19 yang melumpuhkan perekonomian dan sangat berpengaruh terhadap Industri Kecil dan menengah.
- b. Dukungan persebaran dan penguatan industri. Merupakan indikator dalam rangka melakukan kegiatan pembinaan industri Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu. Dengan target sebanyak 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota yang terealisasi semuanya, dimana pembinaan industri di Provinsi Bengkulu dilakukan baik melalui APBD dan APBN dengan tetap memperhatikan asas pemerataan dengan memberikan Bimtek Produksi Masker, Hand Sanitizer dan Minuman Herbal, serta bantuan mesin tenun ke sentra di 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Kaur, Rejang Lebong dan Seluma.
- c. Mendorong Perusahaan Industri Besar untuk Pembaharuan Izin, dimana ada 3 Perusahaan CPO . yang telah melaksanakannya.
- d. Dukungan pengembangan Kawasan Terpadu Dekranasda Provinsi Bengkulu. Dalam rangka mendorong tumbuh kembangnya sektor industri kerajinan daerah dan mendorong DEKRANASDA untuk memfasilitasi pemasaran dari industri kerajinan daerah, pada tahun 2019 telah dilaksanakan launching/peresmian kawasan terpadu Dekranasda sebagai sentra kerajinan berbasis kearifan lokal sekaligus menjadi showroom produk kerajinan daerah dari 10 Kab/Kota sampai tahun 2020 masih memfasilitasi pemasaran produk kerajinan daerah.

URUSAN PERDAGANGAN:

- a. Konsistensi Kegiatan Pelaksanaan Pasar Murah menghadapi Hari Besar Keagamaan setiap tahunnya. Dimana pelaksanaan pasar murah dilakukan di titik kemiskinan di 10 (sepuluh) kabupaten kota Bengkulu dalam rangka menjamin kemampuan daya beli dan stabilitas harga.
- b. Monitoring Stok Bahan Pokok Strategis yang aktif dilaksanakan setiap hari selama 5 (lima) hari kerja.

- c. Pelaksanaan Monitoring dan pembinaan pasar secara berkala baik kepada pedagang, pengecer maupun pelaku distributor daerah.
- d. Memfasilitasi penerbitan rekomendasi untuk mendukung permohonan bantuan kepada pemerintah pusat dalam rangka pembangunan sentra industri tersebar di 6 (enam) Kabupaten/kota yang difasilitasi penerbitan rekomendasi untuk mendapatkan dana DAK Tahun 2020. walaupun pada akhirnya di reconfusing oleh pusat untuk penanganan dampak pandemi covid
- e. Peningkatan Pengawasan Barang Beredar. Pengawasan dimaksud dilaksanakan dengan memeriksa kesesuaian atau pemenuhan terhadap persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI), label, serta mengawasi produk yang tidak layak konsumsi, misalnya dalam bentuk kemasan yang sudah rusak ataupun kadaluarsa. Total barang yang diawasi disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (23 macam) yang mencapai 85% dari total barang yang beredar dimasyarakat.
- f. Peningkatan Monitoring dan Pengawasan Barang-barang dalam Pengawasan.
- g. Optimalisasi Penyelenggaraan BPSK Provinsi dengan kegiatan monitoring/kunjungan kerja dan koordinasi ke BPSK Muka Muka untuk memperoleh informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan kegiatan BPSK dalam melaksanakan perlindungan konsumen serta hambatan dan kendala yang mungkin ditemui sekaligus untuk mengetahui permasalahan/pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat.

Beberapa faktor penghambat yang menjadi kendala dalam pencapaian sasaran kinerja tahun 2020 diantaranya sebagai berikut:

ASPEK KELEMBAGAAN:

- a. Belum tervalidasinya data industri dan perdagangan yang didapat melalui dinas yang menangani industri dan perdagangan di Kab/Kota. Hal tersebut menyebabkan masih perlunya validasi terlebih dahulu untuk dapat digunakan serta dikembangkan. Dan Adanya reconfusing anggaran untuk penanganan dampak pandemi Covid 19 di Provinsi Bengkulu.

URUSAN PERINDUSTRIAN:

- a. Pandemi Covid 19 di Provinsi Bengkulu memberikan dampak hampir di semua sektor termasuk sektor industri, dimana sebagian besar industri terdampak sehingga berhenti berproduksi dan melakukan PHK.

- b. Masalah permodalan juga menjadi permasalahan tersendiri dalam rangka penumbuhan dan pengembangan industri kecil menengah di Provinsi Bengkulu.
- c. Tingginya ketergantungan wirausaha baru terhadap bantuan permodalan dan mesin/peralatan produksi kepada Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya menyebabkan belum maksimalnya peningkatan produksi yang mempengaruhi peningkatan kapasitas IKM secara keseluruhan. Hal tersebut juga mempengaruhi calon wirausaha dimana belum semua calon wirausaha untuk mengurus IUMK;
- d. Beberapa kelompok usaha baru (KUB) dari beberapa sentra industri masih kesulitan modal dalam pengurusan akta notaris yang merupakan salah satu prasyarat diterimanya bantuan mesin/peralatan produksi dari Pemerintah terutama Pemerintah Daerah sehingga membuat IKM sulit berkembang dan naik kelas dalam skala usahanya saat ini. Hal menyebabkan pertumbuhan industri di Provinsi Bengkulu pada Tahun 2020 hanya pada industri mikro dan rumah tangga yang tidak memiliki legalitas formal
- e. Belum maksimalnya penyajian data perkembangan realisasi investasi dan realisasi produksi sektor besar – sedang dikarenakan masih belum adanya kesadaran perusahaan melaporkan perkembangan realisasi usaha dan nilai produksi yang menjadi salah satu indikator peningkatan nilai investasi sektor industri di Provinsi Bengkulu sehingga menyebabkan pendataan yang dilakukan aparatur kabupaten/kota masih belum menyajikan data secara menyeluruh;
- f. Masih belum maksimalnya pendataan perkembangan IKM karena tidak tersedianya anggaran dalam pemuktahiran data IKM, sehingga pemuktahiran data masih belum maksimal disajikan secara real dan akurat;
- g. Belum tersedianya sistem atau instrumen pengumpulan data yang dapat menyajikan data secara real time dan valid sehingga pengumpulan data masih bersifat manual dan membutuhkan proses lebih lama.
- h. Beberapa unit usaha ditemukan vakum produksi artinya tidak ditemukan proses produksi akibat tidak mampu bersaing dengan kompetitor baru sehingga mempengaruhi peningkatan unit usaha dan peningkatan realisasi investasi. Adapun peningkatan unit usaha dan realisasi investasi hanya terjadi pada wirausaha baru yang tumbuh pada tahun 2020.

URUSAN PERDAGANGAN:

- a. Tidak tercapainya target Jumlah BPSK yang terbentuk disebabkan oleh tidak. Peralihan kewenangan dari Kab/Kota menjadi kewenangan Provinsi

juga mengharuskan Pemerintah Provinsi mengalokasikan dana untuk perekrutan anggota dan sekretariat BPSK serta operasional BPSK di Kab/Kota.

- b. Beberapa pemerintah daerah belum memiliki data yang lengkap mengenai kondisi pasar tradisional, pasar modern, maupun sarana gudang yang ada di wilayahnya. Bahkan masih terdapat daerah yang belum memiliki data gudang di wilayahnya.
- c. Belum maksimalnya penyajian data Informasi Perdagangan berupa Jumlah SIUP, TDP dan TDG yang terdata karena belum terakomodirnya kegiatan pengolahan entry data karena keterbatasan anggaran. Selain itu, masih kurangnya koordinasi antara unit/instansi yang menerbitkan SIUP, TDP dan TDG dengan instansi yang mengurus perdagangan pada kabupaten/kota (selaku instansi teknis yang bertanggung jawab dalam pembuatan SIUP dan TDP).
- d. Belum maksimalnya pembinaan dan sosialisasi terkait Jumlah gudang dengan sistem resi gudang karena keterbatasan anggaran. Kementerian Perdagangan telah menerbitkan kebijakan baru terkait sarana pergudangan yang ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang, yang menggantikan sekaligus mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/MDAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang dimana salah satu pokok perubahannya adalah pengaturan mengenai klasifikasi gudang yang lebih tegas dan jelas karena telah mengakomodir ketentuan mengenai klasifikasi gudang terbuka maupun gudang tertutup, termasuk indikator klasifikasi yang diperjelas dengan kriteria luas dan indikator volume. Namun kebijakan tersebut belum maksimal dilakukan karena keterbatasan anggaran yang mendukung kinerja sub sektor perdagangan dalam negeri.
- e. Kendala kinerja ekspor impor daerah yang paling utama saat ini adalah penurunan permintaan jumlah ekspor komoditi dari Provinsi Bengkulu di sektor non migas, akibat dari dampak pandemi Covid 19 yang menyebabkan turunnya permintaan pasar ekspor. Selain itu, masalah lainnya adalah tidak stabilnya harga komoditas dunia. Hal tersebut dapat menyebabkan penurunan kinerja ekspor dan neraca perdagangan Bengkulu. Namun hal tersebut tidak dapat hanya diatas oleh Dinas Perindag saja. Dibutuhkan dukungan dari seluruh instansi terkait untuk mengatasi permasalahan yang ditemui sehingga dapat meningkatkan kinerja ekspor dan neraca perdagangan Bengkulu.
- f. Belum tersedianya peralatan kalibrasi dan peralatan pengujian komoditi ekspor daerah yang menjadi potensi PAD dan ditambah masih

- terbatasnya jumlah SDM Fungsional sertifikasi mutu barang menjadi kendala lain yang menghambat dukungan terhadap kinerja ekspor daerah;
- g. Pelaksanaan promosi produk ekspor daerah masih belum dilakukan optimal karena keterbatasan anggaran dan juga akibat pandemi covid semua kegiatan promosi berupa pameran di tiadakan seperti Bengkulu Ekspo, International Coffee Day.



DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
a. Pendahuluan	
b. Dasar Hukum	2
c. Gambaran Organisasi	3
d. Sistematika Penulisan	10
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA	11
a. Rencana Strategis	11
b. Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja	15
BAB III AKUTANTABILITAS KINERJA	25
a. Pencapaian Kinerja Sasaran	25
a.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja	26
Hasil program dan Kegiatan Industri	
Disperindag	27
1. Bidang Pengembangan Industri Kecil	
Menengah	27
2. Bidang industry Agro dan	
pengembangan wilayah industri	29
Hasil program dan Kegiatan Perdagangan	
Disperindag	32
1. Bidang Perdagangan Dalam Negeri	32
2. Bidang Perdagangan Luar negeri	33
3. Program Perlindungan Konsumen dan	
Pengamanan Perdagangan	36
a.2. Sasaran kinerja utama “Persentasi	
Kontribusi Sub sektor Industri terhadap	
perekonomian daerah	38
Indikator kinerja utama “Persentasi	
Kontribusi Sub sektor Industri terhadap	38

	PDRB “	
	1. Analisa program/Kegiatan Pendukung pencapaian sasaran Strategis 1	39
	2. Analisa Kegagalan yang menjadi Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran	40
	3. Upaya Pemecahan	41
a.3.	Sasaran Strategis Kedua “ Meningkatkan kontribusi sub sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah “	42
	Indikator kinerja utama “kontribusi sektor perdagangan pada PDRB	42
	1. Analisa Keberhasilan Program/Kegiatan Pendukung pencapaian sasaran Strategis 2	43
	2. Analisa Kegagalan yang menjadi Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ke 2	46
	3. Upaya Pemecahan	48
a.4.	Sasaran Strategis ketiga “Meningkatnya capaian kinerja OPD.	49
	Indikator kinerja utama “Nilai SAKIP Disperindag”	50
	1. Analisa Keberhasilan Program/Kegiatan Pendukung pencapaian sasaran Strategis 3	51
	2. Analisa Kegagalan yang menjadi Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ke 3	52
	3. Analisa Keberhasilan Program/Kegiatan Pendukung pencapaian sasaran Strategis 3	52
b.	Akuntabilitas Kinerja Keuangan Tahun 2020	53
	1. Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020	53
	2. Realisasi Keuangan Tahun 2020	53
BAB IV	PENUTUP	58
	a. Kesimpulan.....	58
	b. Saran.....	59



DAFTAR TABEL

No	Nama Tabel	Hal
Tabel 1.1	Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu	8
Tabel 1.2	Kondisi sarana dan prasarana di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu pada tahun 2019	9
Tabel 2.1	Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan dan Pengembangan INDAG Tahun 2016-2021	17
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2020	17
Tabel 2.3	Perjanjian kerja dan Uraian kegiatan yg dilaksanakan	18
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Sasaran I Tahun 2020	27
Tabel 3.2	Perbandingan capaian kinerja s.d Ahir Periode RPJMD	27
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian dengan Capaian Nasional	27
Tabel 3.4	Capaian Bidang IKM Disperindag Provinsi Bengkulu	28
Tabel 3.5	Capaian Bidang IKM Disperindag Provinsi Bengkulu	28
Tabel 3.6	Capaian Bidang Agro Disperindag	30
Tabel 3.7	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2016-2020	31
Tabel 3.8	Pencapaian kinerja sasaran II Tahun 2020	31
Tabel 3.9	Perbandingan Capaian Kinerja s.d Ahir Periode RPJMD	31
Tabel 3.10	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional	32
Tabel 3.11	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Disperindag	33
Tabel 3.12	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target PLN Disperindag	33
Tabel 3.13	Realisasi Kegiatan Ekspor	35
Tabel 3.14	Realisasi kegiatan Impor	36
Tabel 3.15	Nilai SAKIP Dinas perindustrian dan Perdagangan provinsi	37
Tabel 3.16	Pencapaian kinerja sasaran III Tahun 2020	37

Tabel 3.17	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran III	37
Tabel 3.18	Perbandingan Capaian kinerja sasaran s/d ahir periode RPJMD	37
Tabel 3.19	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional	38
Tabel 3.20	Data PAD Disperindag provinsi Bengkulu	53
Tabel 3.21	Rekapitulasi penggunaan Anggaran 2020	54
Tabel 3.22	Rekapitulasi Penggunaan dana APBN	57

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinas Perindustrian dan Perdagangan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu dan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu yang mempunyai tugas yang sangat strategis yaitu membangun dan mengembangkan bidang industri dan perdagangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan *Good Governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LKJ).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholders demi perbaikan kinerja Disperindag. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu selama Tahun 2020. Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam

mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya. Dengan demikian program di tahun mendatang dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

- Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 15);
 12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 Nomor 6);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8);
 15. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Daerah Provinsi Bengkulu;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 – 2021.
 17. Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Nomor : Tahun 2020 Tanggal 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu

C. Gambaran Organisasi

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sesuai Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 sebagai berikut: Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan.
2. Pengelolaan dan fasilitasi di bidang perindustrian dan perdagangan.
3. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
4. Pemberian perizinan dan pelayanan umum lintas kabupaten/kota.

5. Pelaksanaan ketatausahaan dinas.
6. Pembinaan kelompok jabatan fungsional.
7. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang perindustrian dan perdagangan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu, terdiri dari 1 (satu) Eselon II, 6 (enam) Eselon III yang terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 4 Bidang Teknis serta 1 (satu) UPTD, 18 (delapan belas) Eselon IV dan Kelompok Fungsional. Adapun Bagan Organisasi adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI BENGKULU



Tugas pokok masing-masing unit kerja sesuai Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 52 Tahun 2016 tanggal 21 Desember 2016, adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat, dengan tugas “mengarahkan program kerja, Mengelola urusan keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, rumah tangga,

perlengkapan, dokumentasi dan informasi, Mengkoordinasikan pengidentifikasian produk hukum daerah serta menginventarisir permasalahan kelembagaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

2. Bidang Industri Agro dan Pengembangan Perwilayahan Industri dengan tugas “Penyiapan koordinasi, fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan industri provinsi, penyebaran dan pembangunan industri, penanaman modal di bidang industri, Pengelolaan sistem informasi industri, Penyiapan koordinasi dan fasilitasi penerbitan izin usaha industri kecil dan izin usaha industri menengah, izin usaha kawasan industri yang lokasinya di daerah kawasan industri di wilayah kabupaten/kota, Pengawasan dan pengendalian usaha industri besar dan usaha kawasan industri di wilayah kabupaten/kota”.
3. Bidang Industri Menengah dan Pengembangan Akses Industri dengan tugas“Melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi pembangunan sumber daya manusia industri, penjaminan ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk industri dalam negeri, pengembangan dan pemanfaatan, kreatifitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan industri di wilayah kabupaten/kota, serta penyediaan pembiayaan yang kompetitif dan pemberian fasilitas di wilayah.”
4. Bidang Perdagangan Dalam Negeri dengan tugas “Melaksanakan penyusunan rencana pelaksanaan penyiapan koordinasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana perdagangan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi, Mengkoordinasikan ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah, Memimpin pelaksanaan operasi pasar, Memantau pelaksanaan pendistribusian dan stok pupuk bersubsidi bersama komisi pengawas pupuk pestisida provinsi, produsen dan distributor serta membuat laporan hasil pemantauan, Melaksanakan promosi dagang produk unggulan yang berasal dari kabupaten/kota, Menyelenggarakan pengawasan barang beredar dan melakukan penegakan hukum dibidang perlindungan konsumen”.
5. Bidang Perdagangan Luar Negeri dengan tugas “Melaksanakan penyusunan rencana pelaksanaan tugas, Penyiapan bimbingan teknis pembinaan dunia usah di bidang ekspor impor, Meningkatkan pengawasan mutu perizinan dan rekomendasi dibidang ekspor impor, Menganalisa iklim usaha dan pemantauan komoditi dibidang ekspor, Meningkatkan kerjasama dengan bidang usaha dibidang ekspor, impor, Melaksanakan pendataan komoditi potensial di bidang ekspor”.
6. UPTD Badan Penelitian dan Pengujian Mutu Barang (BPPMB).

7. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan secara professional, Kelompok jabatan fungsional dapat melakukan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, Tenaga fungsional terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan, Seorang tenaga fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara fungsional yang ada dilingkungan dinas, Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai peran yang strategis yaitu pembinaan dan pengembangan industri dan perdagangan sebagaimana tercermin dalam PERDA Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan di bidang industri dan perdagangan. Dilakukan secara lebih aplikatif, antara lain:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan dibidang perindustrian dan perdagangan;
2. Meningkatkan daya saing industri di Provinsi Bengkulu melalui:
 - Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
 - Peningkatan Nilai Tambah Industri Berbasis Sumber Daya Alam;
 - Peningkatan Kapasitas Teknologi Industri;
 - Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
 - Peningkatan Standarisasi Industri;
 - Peningkatan Industri Berbasis Sumber Daya Alam).
3. Meningkatkan ekspor non-migas dan pengendalian impor;
4. Meningkatkan efisiensi perdagangan dalam negeri dalam kaitannya dengan menciptakan stabilitas harga pokok dan mengendalikan inflasi, memberdayakan komoditi agro melalui pelaksanaan pasar lelang komoditi agro.
5. Meningkatkan perlindungan konsumen dalam kaitannya dengan tertib niaga dan perlindungan konsumen, pengawasan barang beredar ilegal, sertifikasi mutu barang.
6. Peran strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga tercermin dalam agenda / prioritas pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 yaitu Peningkatan sektor industry dan meningkatkan net ekspor perdagangan dalam & luar negeri.

Berdasarkan Kekuatan Sumber Daya yang ada, Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 keadaan pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Kondisi Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu pada tahun 2020

NO	SARANA	KONDISI		JUMLAH			PRASARANA	KONDISI		JUMLAH			KET
		BAIK	RUSAK	LENGKAP	MENCUKUPI	KURANG		BAIK	RUSAK	LENGKAP	MENCUKUPI	KURANG	
1	mobil	5	2				Gedung Kantor	5	0		√		
2	Motor	8	9				Rumah Dinas	-	6		√		
3							Kebun/ Tempat Kerajinan	2	0		√		
4							Meja	38	123			√	
5							Kursi	34	72			√	
6							Kursi Lipat	0	100			√	
7							Kursi Putar	25	50			√	
8							Kursi Tamu	0	13			√	
9							Komputer	17	10			√	
10							Printer	25	20			√	
11							Laptop/ Notebook	11	5			√	
12							Air Conditioner	20	10			√	
13							Lemari	2	5			√	
14							Filling Cabinet	5	8			√	
15							Infocus/Proyektor	2	4			√	
16							Peralatan Laboratorium	31	0			√	
17							Peralatan Kantor Lainnya	28	1			√	
18							Sound System	1	-		√		

Sumber : Data Inventarisir Barang dan Aset OPD, Tahun 2020

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

a. Ikhtisar Eksekutif.

Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, langkah-langkah yang diambil, serta langkah antisipatifnya.

b. Bab I. Latar Belakang

Bagian ini menguraikan latar belakang, landasan hukum, tujuan, peran strategis, kekuatan sumber daya, tugas, fungsi dan struktur organisasi, peran strategis, kekuatan sumber daya serta sistematika laporan.

c. Bab II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja.

Bagian ini menguraikan tentang Rencana Strategis dan Penetapan / Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2020.

d. Bab III. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Bagian ini menguraikan tentang pencapaian kinerja sasaran, Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov.Bengkulu Tahun 2020, dan akuntabilitas terhadap seluruh anggaran OPD (APBD/APBN/Sumber Lain)

e. Bab IV. Penutup

Bagian ini menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dan saran.

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Agenda pembangunan bidang ekonomi sebagaimana tertuang pada misi kedua dan keempat dalam RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 adalah “Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesejahteraan sosial dan layanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan serta perekonomian rakyat berbasis keunggulan lokal” dan “Mewujudkan pola pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan”. Dengan tujuan yang terkait langsung dengan Dinas Perindag Provinsi Bengkulu, antara lain (1) Meningkatkan net ekspor perdagangan dalam & luar negeri; (2) Meningkatkan percepatan kinerja sektor industri.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan bertugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang Perindustrian dan Perdagangan. Dalam kurun waktu 2016-2021 dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun dan memperhitungkan potensi, peluang, serta kendala yang ada maupun tantangan yang mungkin terjadi.

Dalam rangka mendukung misi dan tujuan dalam RPJMD Provinsi Bengkulu tahun 2016-2021 tersebut, maka Kepala Dinas telah menetapkan Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu, yaitu menjadikan **“Terwujudnya Bengkulu yang Maju, Sejahtera dan Berdaya Saing dengan Struktur Industri dan Perdagangan yang Kuat dan Berkeadilan”**.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 3 (tiga) misi sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu sebagai berikut:

1. Meningkatkan Produktivitas, Daya Saing dan Kemandirian Industri berbasis unggulan daerah yang sistematis, berkelanjutan dan terintegrasi
2. Meningkatkan peran perdagangan sebagai sektor penggerak yang kuat dalam perekonomian daerah
3. Meningkatkan Layanan Prima kepada Masyarakat melalui Kinerja Organisasi yang efektif dan Aparatur profesional

Dalam rangka implementasi atau penjabaran dari misi, ditetapkan tujuan yang merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu, yaitu satu sampai lima tahun kedepan dalam tahun 2016-2021, serta

menggambarkan arah strategis organisasi, perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi, serta meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu telah ditetapkan adalah “Meningkatnya Kontribusi sektor industri dan perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah”

Untuk menjabarkan tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyusun sasaran strategis. Sasaran Strategis Dinas Perindag untuk tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1 (satu) Meningkatnya kontribusi sub sektor industri terhadap perekonomian daerah yang diukur dari Indikator Kinerja Utama Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Provinsi Bengkulu;
2. Meningkatnya kontribusi sub sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah yang diukur dari Indikator Kinerja Utama adalah Persentase Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
3. Meningkatnya Capaian Kinerja OPD yang diukur dari Indikator kinerja Utama adalah Nilai SAKIP Disperindag;

Sasaran Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan diatas akan dicapai melalui 5 (lima) program yang dilaksanakan oleh masing-masing unit eselon III sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun kelima program tersebut adalah:

Program Prioritas yang meliputi:

1. Program Pengembangan Industri Sedang Besar

Program ini bertujuan memperkuat basis produksi untuk meningkatkan nilai tambah sektor industri yang berbasis sumber daya alam hasil pertanian perkebunan;

2. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Program ini bertujuan untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengembangan IKM, meningkatkan nilai tambah produk, menumbuhkan populasi IKM, memanfaatkan sumber daya termasuk SDA kabupaten/kota secara optimal, mengembangkan OVOP, mengembangkan industri kreatif, meningkatkan daya saing industri kecil dan menengah, meningkatkan nilai tambah sepanjang rantai nilai komoditi.

3. Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

Program ini bertujuan meningkatkan distribusi perdagangan, sarana dan prasarana penunjang perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing produk Provinsi Bengkulu

4. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Program ini bertujuan memberdayakan konsumen, penguatan lembaga perlindungan konsumen, dan peningkatan kapasitas kelembagaan balai penelitian dan pengujian mutu barang, serta optimalisasi pengawasan barang beredar terutama terhadap barang-barang strategis, obat dan makanan.

5. Program Pengembangan Perdagangan Luar Negeri

Program ini bertujuan meningkatkan daya saing global produk Provinsi Bengkulu hingga ke luar negeri

6. Program Penunjang yang meliputi:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan dalam bidang penyediaan maupun pemeliharaan sarana dan prasarana yang diperlukan Dinas Perindag dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan nyaman bagi para pemangku kepentingan. Sebagai indikator pencapaiannya tersedianya sarana dan prasarana kerja sesuai kebutuhan.

3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Program ini bertujuan untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Instansi sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Dengan berpedoman pada Rencana Strategis, Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyusun Rencana Kerja (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang meliputi kegiatan pokok dan kegiatan pendukung (sub kegiatan) untuk mencapai sasaran hasil program induknya, dan dirinci menurut sasaran output dan outcome pada tahun rencana, prakiraan sasaran tahun berikutnya, lokasi, pagu indikatif sebagai indikasi pagu anggaran, serta cara pelaksanaannya. Rincian Program/Kegiatan dalam Rencana Kerja Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air & Listrik
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4. Penyediaan ATK
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
7. Penyediaan Makan Minum Rapat
8. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
9. Penyediaan Jasa Administrasi dan Tekhnis Perkantoran
10. Publikasi dan Dokumentasi
11. Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir Barang Milik Daerah
12. Pengelolaan dan Operasional UPTD BPPMB

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
2. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
3. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
4. Penambahan Daya Listrik

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Koordinasi Perencanaan Bidang Perindustrian Dan Perdagangan
2. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan

4. Program Pengembangan Industri Besar

1. Penumbuhan dan pengembangan industri sedang besar

5. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

1. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
2. Pembinaan dan Pengembangan Industri Kreatif Daerah
3. Pembinaan dan Fasilitasi Industri Kecil Menengah (IKM) dalam pengembangan Dekranasda Provinsi Bengkulu
4. Fasilitasi HAKI/ Pendaftaran Merk Komoditi Unggulan Provinsi Bengkulu

6. Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

1. Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
2. Fasilitasi Pasar Murah Provinsi Bengkulu

7. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

1. Pembinaan dan Pengawasan Legimitasi Mutu Barang Beredar dengan SNI
2. Penyediaan Peralatan Uji Mutu Barang di UPTD PPMB Provinsi Bengkulu (DAK)
3. Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

8. Program Pengembangan Perdagangan Luar Negeri

1. Promosi dan Fasilitasi Produk Unggulan Daerah Provinsi Bengkulu
2. Konferensi Kopi Bengkulu
3. Peningkatan dan pengembangan perdagangan luar negeri

B. Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah

untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja antara lain:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan Monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis. Sasaran Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2020 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Matriks Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016-2021.

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan memuat 3 (tiga) sasaran strategis. Ketiga sasaran strategis tersebut sebagai berikut:

1. Meningkatnya kontribusi sub sektor industri terhadap perekonomian daerah yang diukur dari Indikator Kinerja Utama Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Provinsi Bengkulu;
2. Meningkatnya kontribusi sub sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah yang diukur dari Indikator Kinerja Utama adalah Persentase Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
3. Meningkatnya Capaian Kinerja OPD yang diukur dari Indikator kinerja Utama adalah Nilai SAKIP Disperindag;

Tabel 2.1
Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan dan Pengembangan
INDAG Tahun 2016-2021

MISI	Meningkatkan Produktivitas, Daya Saing dan Kemandirian Industri berbasis unggulan daerah yang sistematis, berkelanjutan dan terintegrasi	Meningkatkan peran perdagangan sebagai sektor penggerak yang kuat dalam perekonomian daerah	Meningkatkan Layanan Prima kepada Masyarakat melalui Kinerja Organisasi yang efektif dan Aparatur profesional
TUJUAN	Meningkatnya Kontribusi sektor industri dan perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah		
SASARAN STRATEGIS	1. Meningkatnya kontribusi sub sektor industri terhadap perekonomian daerah	2. Meningkatnya kontribusi sub sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah	3. Meningkatnya Capaian Kinerja OPD yang diukur dari Indikator kinerja Utama adalah Nilai SAKIP Disperindag

Perjanjian kinerja yang ditetapkan pada tahun 2020 antara Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu dan Gubernur Bengkulu mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP, dengan format seperti yang digambarkan dalam matriks di bawah:

Tabel 2.2: Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun 2020

Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
Meningkatnya kontribusi sub sektor industri terhadap perekonomian daerah	1	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Provinsi Bengkulu	%	6,31
Meningkatnya kontribusi sub sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah	2	Persentase Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	15,43
Meningkatnya Capaian Kinerja OPD	3	Nilai SAKIP Disperindag	%	A

Dalam perjanjian kinerja yang ditetapkan ini maka disperindag dengan bidang perindustrian dan perdagangan menguraikan kembali untuk menjadikan target tersebut menjadi target program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, adapun perjanjian yang menjelaskan dan menguraikan atas perjanjian instansi tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja dan uraian kegiatan yang dilaksanakan tahun 2020
Kinerja Kepala Bidang (Eseklon III)

BIDANG IKM				
Program	Indikator program	Target %	Realisasi 2020 %	Capaian (%)
Program pengembangan IKM	Persentase Pertumbuhan Unit Industri kecil dan menengah	11	7,2	65,45
	Persentase Sentra industry yang dikembangkan	3,79		
	Persentase Peningkatan Nilai Produksi kecil menengah	6,00		

BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI				
Program	Indikator program	Target %	Realisasi 2020 %	Capaian (%)
Program pengembangan Perdagangan Luar Negeri	Persentase Peningkatan Ekspor	16,24	-20,4 %	-125,6 %

BIDANG AGRO dan PENGEMBANGAN WILAYAH INDUSTRI				
Program	Indikator program	Target %	Realisasi 2020 %	Capaian (%)
Program pengembangan Industri Agro	Nilai Investasi Industri Besar dan sedang	270 M	25,9 M	9,59

BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI				
Program	Indikator program	Target %	Realisasi 2020 %	Capaian (%)
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase Peningkatan Nilai Perdagangan Besar dan Eceran	5	-0,83	16,6
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Koefisien Kesetabilan Harga	<10	5,98	100
	Indek Kepuasan konsumen	80 Nilai Indeks	Tidak Dilaksanakan	0

BAGIAN UPTD PPMB				
Program	Indikator program	Target	Realisasi 2020	Capaian (%)
Program Pembinaan dan Pengawasan Legitimasi Mutu Barang beredar dengan SNI	Indek Kepuasan Pelanggan Atas Pelayanan Pengujian Sertifikasi Produk , Komuditi unggulan dan Pengawasan Mutu Barang	80 Nilai indek	Tidak Dilakukan	0
Program Penyediaan Peralatan Uji Mutu Barang di UPTD PPMB	Indek Kepuasan Konsumen	80 %	Tidak Dilaksanakan	0
Program Pelayanan Administrasi Kantor yang diklaksanakan	Jumlah Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dilaksanakan	14 Jenis	14 Jenis	100

BAGIAN SEKRETARIAT				
Program	Indikator program	Target	Realisasi 2020	Capaian (%)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran dilaksanakan	14 Jenis	14 Jenis	100
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana dan Prasarana Perkantoran yang diadakan / dibangun / direhab / dipelihara	45 Unit	45 Unit	100
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya	2 Orang	-	0
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan Yang Disusun	10 Dokumen	10 dokumen	100

Perjanjian Kinerja Eselon IV

SIE IOGAM , ELEKTRONIK, ALAT ANGKUT dan SUMBER DAYA INDUSTRI				
Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi 2020	Capaian (%)
Penumbuhan dan Pengembangan IKM	Jumlah Unit Usaha Baru IKM	100 Unit	40 Unit	40
	Jumlah izin industry Kecil dan Menengah	100 Izin	60 Izin	60
	Nilai Investasi IKM (Logam,Mesin dll)	120 M	0,33 M	1,27
Rata – Rata Capaian				

SIE FASILITASI INDUSTRI ,AKSES PASAR NASIONAL DAN INTERNASIONAL				
Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target %	Realisasi 2020 %	Capaian (%)
Pembinaan dan Fasilitasi IKM dalam Pengembangan Dekranasda Provinsi Bengkulu	% Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	4	0,06	1,5
	% Cakupan Bina Sentra Pengrajin	4	0,06	1,5
	% pengrajin yg difasilitasi Pemasaran , HAKI, Kemasan ,mesin , Peralatan dan Modal.	2	0,92	46
Penumbuhan dan Pengembangan IKM	% Cakupan Bina Sentra IKM	7,52	13,7	182
	% Pertumbuhan Sentra IKM Pertahun	3,62	0	0
	% IKM yg difasilitasi Kemitraan , Pemasaran hasil Produk , HAKI, Kemasan, Sertifikat , halal dan standarisasi	1,83	-19	1,04

SIE IKM Pangan ,Kimia, barang dari Kayu , Furniture, Sandang dan Aneka Kerajinan				
Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target %	Realisasi 2020 %	Capaian (%)
Pembinaan dan Pengembangan Industri Kreatif Daerah	% Pertumbuhan IKM Kreatif,Kriya, Fashion,Kuliner	5,50	200	364
	% Fasilitasi Pemasaran/ Pameran/ Road Show/ Event Industri Kreatif	15	0	0
	Nilai Produk IKM Kreatif	10	5,28	52,8
	Nilai Investasi sector industry Kreatif	150 M	5,53 M	3,68
Penumbuhan dan Pengembangan IKM	% Pertumbuhan sentra OVOP Pertahun	20	0	0

LAKIP 2020

Dinas Perindustrian dan perdagangan Provinsi Bengkulu

	% Cakupan Bina Sentra OVOP	20	0	0
	Nilai investasi IKM Pangan ,Kimia dll	120 M	3,578 M	2,98
SIE EKSPOR				
Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi 2020	Capaian (%)
Peningkatan Pengembangan Perdagangan Luar negeri	Nilai Ekspor propduk Pertanian dan Kehutanan	\$ 22	\$ 18,79	85,27
	Nilai EKspor Produk Industri dan Pertambangan	\$ 150	\$ 84,89	56,59
	Survei Kepuasan Masyarakat	78 Nilai Indek	Tidak Dilakukan	0
SIE Promosi Citra dan Pengembangan Ekspor				
Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi 2020	Capaian (%)
Promosi dan Fasilitasi Produk Unggulan Daerah Provinsi Bengkulu	Fasilitasi Pemasaran Produk Ekspor	2 Kali	1 Kali	50
KONFRENSI kopi DAERAH DAN fasilitasi PEMASARAN kopi Bengkulu	Jumlah Konfrensi Kopi daerah internasional	1 Event	1 Event	100
SIE IMPOR				
Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi 2020	Capaian (%)
Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	Nilai Impor	\$ 77	\$ 3,27	4,24
	Survei Kepuasan Masyarakat	78 nilai Indeks	78,2	100
SIE Ketahanan Industri				
Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target %	Realisasi 2020	Capaian (%)
Penumbuhan dan Pengembangan Industri sedang besar	Cakupan Binaan Perusahaan Industri sedang besar	50	31,8	63,6

LAKIP 2020

Dinas Perindustrian dan perdagangan Provinsi Bengkulu

SIE PENGEMBANGAN WILAYAH INDUSTRI				
Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi 2020	Capaian (%)
Penumbuhan dan Pengembangan Industri sedang besar	Jumlah Industri Sedang besar yang tumbuh	42 perusahaan	44	104
SIE FASILITASI INDUSTRI HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN				
Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi 2020	Capaian (%)
Penumbuhan dan Pengembangan Industri besar dan Sedang	Jumlah Industri Sedang dan Besar yang Tumbuh	42 Perusahaan	2	4,76
	Jumlah Rekomendasi Tehnis yang dikeluarkan	1 Dokumen	3 Dokumen	300
SIE PENGUJIAN MUTU				
Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi 2020	Capaian (%)
Peningkatan Kapasitas Lab Penguji Mutu barang Ekspor dan Impor	Indek Kepuasan Pelanggan	80 Nilai Indeks	Tidak Dilakukan	0
SIE JAMINAN MUTU				
Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi 2020	Capaian (%)
Peningkatan Penyediaan Peralatan Uji Mutu barang di UPTD BPPMB	Indek Kepuasan Konsumen	80 %	Tidak Dilakukan	0
SIE Tata Usaha				
Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi 2020	Capaian (%)
Pengelolaan dan Operasional UPTD PPMB	Tingkat Akreditasi UPTD BPPMB	A	BB	95

SIE PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA				
Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi 2020	Capaian (%)
Peningkatan Pengawasan Peredaran barang dan Jasa	Jumlah Produk yang diawasi	2 Produk	2 Produk	100
	Jumlah bahan berbahaya yang diawasi	2 Bahan	2 Bahan	100
SIE USAHA LOGISTIK DAN SARANA DISTRIBUSI				
Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi 2020	Capaian (%)
Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	% Pertumbuhan dagang Besar/ Eceran	21 %		
	% Cakupan Bina Kerlompok Pedagang/ Usaha Informal	6 %		
	% Pertumbuhan Omset Pedagang pertahun	16 %		
	Fasilitasi sarana dan Prasarana Perdagangan Dalam Negeri dan Sistem distribusi Perdagangan	11 Kali	11 kali	9.1
SIE Bahan Pokok dan Promosi				
Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi 2020	Capaian (%)
Fasilitasi Pasar Murah Provinsi Bengkulu	% Operasi Pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan Pokok	100 %	60 %	60

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

Akuntabilitas kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan capaian kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2020. Keberhasilan/kegagalan diukur berdasarkan pencapaian indikator sasaran terhadap masing-masing sasaran strategik, tujuan dari setiap misi.

A. Pencapaian Kinerja Sasaran

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun 2020 diukur dengan cara membandingkan antara target pencapaian Indikator Sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun 2020 dengan realisasinya.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu. Pengukuran kinerja merupakan hasil penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang diperoleh dari dua sumber yakni (a) data internal Dinas dan (b) data eksternal berasal dari luar instansi baik primer maupun sekunder.

Untuk mengukur pencapaian indikator sasaran pada Tahun 2020, terlebih dahulu diinventarisir hasil pelaksanaan kegiatan untuk kemudian dilakukan analisa serta pembobotan terhadap hasil analisisnya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara:

1. Membandingkan realisasi kinerja dengan target sasaran kinerja yang dicantumkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun 2020;
2. Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;
3. Membandingkan realisasi kinerja program sampai dengan tahun berjalan dengan target sasaran kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis OPD.

Analisa pencapaian pelaksanaan kinerja dan pemberian bobot pada hasil analisa kinerja yang telah dilakukan. Penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

2. Semakin tinggi Realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

3. Pemaknaan dari capaian nilai kinerja ini terbagi atas kualifikasi sebagai berikut :

Persentase : > 100 Sangat baik
 80 – 100 Baik
 55 – 80 Sedang
 < 55 Kurang

A. 1. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja

Tingkat Pencapaian Kinerja berdasarkan program dan kegiatan Dinas Perindustrian Provinsi Bengkulu Tahun 2020 sehubungan Meningkatnya kontribusi sub sektor industri terhadap perekonomian daerah yang diukur dari Indikator Kinerja Utama Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Provinsi Bengkulu,

Apabila melihat secara Makro, yang menjadi target kinerja disperindag provinsi Bengkulu sektor industry dapat dilihat seperti table dibawah ini

Tabel 3.1 : Pencapaian Kinerja Sasaran I Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kontribusi sub sektor industri terhadap perekonomian daerah	Persentase kontribusi sub sektor industri terhadap PDRB	6,31%	6,06%	96,03%

Tabel 3.2 : Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2020	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kontribusi sub sektor industri terhadap perekonomian daerah	Persentase kontribusi sub sektor industri terhadap PDRB	6.22%	6.06%	97,4%

Tabel 3.3: Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2020	Realisasi Nasional	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kontribusi sub sektor industri terhadap perekonomian daerah	Persentase kontribusi sub sektor industri terhadap PDRB	6.06%	5,25%	Pertumbuhan Sektor Industri Bengkulu pada Tahun 2020 sebesar 6.06% dan memberikan kontribusi kepada pertumbuhan sektor industri nasional sebesar 19.86 %.

Adapun hasil program dan kegiatan Dinas perindustrian dan perdagangan Provinsi Bengkulu tahun 2020 dapat digambarkan sebagai Berikut :

1. Bidang Pengembangan Industri Kecil Menengah

Dalam kegiatan di bidang Pengembangan Industri Kecil dan menengah disperindag provinsi Bengkulu telah melakukan 4 Kegiatan dengan indikator yang telah ditetapkan adapun hasil kegiatan tersebut dapat digambarkan seperti table dibawah ini :

Tabel.3.4 Capaian Bidang IKM Disperindag Provinsi Bengkulu

No	Uraian	Realisasi		Persentase	Target %
		2019	2020		
1	Pertumbuhan sentra IKM Pertahun	128	128	0	3,62
2	Pertumbuhan IKM Kreatif, Kriya, fashion, kuliner	1	3	300	5,5
3	Fasilitasi pemasaran /pameran /roadshow/Event/industri kreatif	0	0	0	15
4	Nilai Produksi IKM Kreatif	5,535 M	5,287 M	-4,48	10
5	Pertumbuhan sentra OVOP pertahun	0	0	0	20
6	Pertumbuhan Unit industri Kecil dan Menengah.	6048	6491	93,17	
7	Sentra Industri yang dikembangkan	3	1	33,3	

Dan untuk beberapa cakupan pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2020, dapat dilihat seperti table dibawah ini

Tabel.3.5 Capaian Bidang IKM Disperindag Provinsi Bengkulu

No	Uraian	Target	Pencapaian	Persentase
1	Nilai Investasi IKM pangan, kimia, Barang dari Kayu, furnitur, sandang dan aneka kerajinan (Milyar)	120	3,578	2,98
2	Cakupan bina Sentra OVOP	-	-	-
3	Nilai investasisektor industri Kreatif (Milyar)	150	0	0
4	IKM yang difasilitasi kemitraan Pemasaran hasil HAKI, standarisasi, dan inovasi tehnologi	-	60	-
5	Cakupan bina sentra IKM	102	14	13,7
6	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	0	0	0
7	Cakupan bina sentra pengrajin	0	0	0
8	jumlah unit Usaha baru IKM (Unit)	100	40	40
9	Jumlah Izin Industri (Izin)	100	60	60
10	Nilai investasi IKM (Milyar)	120	0,33	1,27
11	Pengrajin yg difasilitasi Pemasaran, HAKI , kemas, mesin/peralatan, modal	165	40	24,24

Capaian kinerja sasaran pertama didapat dari realisasi capaian output dan Outcome, Kegiatan yang dilaksanakan seperti Jumlah unit Usaha baru industry

Kecil dan menengah (IKM) yang dalam target tahun 2020 adalah 100 unit IKM dalam realisasinya sebanyak 40..IKM atau sebesar 40 persen Begitu juga dengan Jumlah Izin IKM yang ditargetkan dalam perjanjian kinerja adalah 100 perizinan yang akan dikeluarkan pada tahun 2020 tetapi hanya terealisasi sebanyak 60.Perizinan , dalam pelaksanaan cakupan Pembinaan sentra IKM pun dapat dilihat bahwa target yang ditetapkan sebesar 7,52 % dan pencapaiannya sebesar 13,7.Persen tidak berbeda dengan Nilai Investasi IKM yang ditargetkan pada tahun 2020 sebesar 120 milyar kenyataannya hanya mencapai 3,578 milyar .atau hanya tercapai sebesar 2,98 Persen. Persentase sentra industri yang dikembangkan dengan capaian sebesar 33,3 % dari target sebelumnya.

Dan ada beberapa kegiatan pada tahun anggaran 2020 ini, target telah ditetapkan, tetapi kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan , karena tidak tersedianya anggaran (terjadinya Recopusing Anggaran) kegiatan IKM yang Realisasinya Nol tersebut antara lain : Fasilitasi Pemasaran /Pameran /Roadshow/Event/Industri Kreatif, Pertumbuhan Sentra OVOP, Cakupan Bina kelompok Pengrajin, cakupan bina sentra Pengrajin

Beberapa penurunan ini terjadi dikarenakan kegiatan yang bersifat pembinaan untuk mengumpulkan atau bertatap langsung pada tahun 2020 di tiadakan hal ini disebabkan karena adanya wabah Covid 19. Dampaknya adalah penurunan utilisasi. Hal ini diakibatkan oleh turunnya permintaan dan penjualan pada beberapa industri. Kemudian, terjadi PHK akibat dari kapasitas produksi yang menurun, harga bahan baku dan penolong naik karena asal negara impor yang terbatas aksesnya, kurs dolar yang meningkat, serta adanya larangan untuk beroperasi bagi industri di beberapa macam produk dan wilayah.

2. Bidang Industri Agro dan Pengembangan Perwilayahan Industri

Dalam mendukung perekonomian Provinsi Bengkulu salah satu unsur yang memberikan kontribusi adalah industri, baik industri kecil sedang dan besar, untuk program Agro ini lebih melakukan pembinaan dan pengembangan penumbuhan industri sedang dan Besar, dan untuk mengatur wilayah industry dan peraturanya telah dibuat Peraturan Daerah Nomor :09 tahun 2019 Tentang Rencana pembangunan industry provinsi Bengkulu Dan Peraturan Gubernur Nomor : 35 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembinaan, Pengawasan, monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Bengkulu untuk melihat hasil pelaksanaan program dan kegiatan industri sedang dan besar ini sebagaimana data yang telah terhimpun di Dinas perindustrian dan perdagangan dapat digambarkan seperti dibawah ini.

Tabel.3.6 Capaian Bidang Agro Disperindag Provinsi Bengkulu

No	Uraian	Kinerja		Persentase
		Target	Capaian	
1	Cakupan binaan Perusahaan Industri sedang Besar	44	14	31,8
2	Jumlah Industri sedang besar yang tumbuh	42	44	4,54
3	jumlah rekomendasi Tehnis yang dikeluarkan dalam perbaikan perizinan	1	3	300
4	Nilai Investasi industri sedang dan Besar	270 M	25,9 M	9,59
5	Perusahaan yang telah terdaftar dalam SIINas	44	17	38,6

Capaian kinerja sasaran pertama didapat dari realisasi capaian outcome yang didukung oleh realisasi capaian output (1) Jumlah industri sedang dan besar yang tumbuh sebesar 4,54%, Jumlah Rekomendasi teknis yang dikeluarkan sebanyak 3 Rekomendasi. Atau 300% dari yang ditargetkan dan ; Cakupan binaan perusahaan industry sedang besar sebanyak 14 atau sebesar 31,8 % , dan Perusahaan yang telah terdaftar di SIINas sebanyak :17 Perusahaan , atau sebesar 38,6.%

Bila dilihat dari target yang ditetapkan tentunya banyak yang tidak tercapai seperti cakupan binaan yang seharusnya 50 % tetapi hanya mencapai 31, 8 % , Jumlah industry besar yang tumbuh target sebesar 42 % tapi hanya terealisasi 4,54% begitu juga dengan Nilai Investasi Industri sedang yang ditargetkan sebesar Rp. 270 milyar dalam realisasinya sebesar Rp 25,9 Milyar atau hanya mencapai 9,59.% dan dapat dirata ratakan bidang Agro/industry sedang dan besar mencapai 76,9.% pencapaian Hal ini tentunya juga patut kita syukuri, walaupun dalam keadaan pandemic covid 19 masih adanya pertumbuhan dan kegiatan industry besar yang melakukan transaksi walaupun dengan keterbatasan yang ada.

Apabila mellihat secara Makro, yang menjadi target kinerja disperindag provinsi Bengkulu sektor Perdagangan dapat dilihat seperti table dibawah ini

Tabel 3.7 : Tingkat Capaian Kinerja tahun 2016-2020

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Capaian					% Capaian	Kategori
	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
Kontribusi Sektor Perdagangan pada PDRB	15,45%	13,88%	14,40%	14,85%	15,12%	14,31%	92,6	
Rata - rata							98,06	Baik

Tabel 3.8 : Pencapaian Kinerja Sasaran II Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pertumbuhan Perdagangan Dalam Negeri terhadap perekonomian daerah	Kontribusi Sektor Perdagangan pada PDRB	15,45%	14,31%	92,62%

Tabel 3.9 : Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2020	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
	Meningkatnya Pertumbuhan Perdagangan Dalam Negeri terhadap perekonomian daerah	Kontribusi Sektor Perdagangan pada PDRB	15,75%	14,31%	90,85%

Tabel 3.10 : Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2020	Realisasi Nasional	Keterangan
----	-------------------	-------------------------	----------------	--------------------	------------

1	2	3	4	5	6
2	Meningkatnya Pertumbuhan Perdagangan Dalam Negeri	Kontribusi Sektor Perdagangan pada PDRB	14,31%	12,9%	Nilai PDB ADHB sektor Perdagangan Nasional tahun 2020 mencapai Rp 351 trilyun memberikan kontribusi sebesar 12,9 persen terhadap Total PDB ADHB nasional yang mencapai nilai sebesar Rp2720,6. Trilyun. Pada tahun 2020 Sedangkan Sektor Perdagangan di Provinsi Bengkulu berkontribusi sebesar 15,4 % dari total PDRB ADHB daerah yang mencapai nilai sebesar Rp11.644 Trilyun

Bila dilihat secara Makro Realisasi capaian outcome dan output (1) Persentase pertumbuhan sub sektor perdagangan dalam negeri 14,31% atau persentase capaian sebesar 92,62 % Koefisien kestabilan harga dengan nilai koefisien 5,98 persen jika dirata-ratakan di pasar yang diawasi harganya mengalami kenaikan dan penurunan tidak lebih dari 6.% dari harga yang telah ditetapkan.. Tentunya penurunan ini dapat di jaga kesetabilanya karena beberapa kegiatan perdagangan dilapangan, dimasa pandemi ini lebih mendapat perhatian dari pemerintah untuk menjaga ketersediaan dan kemampuan daya beli akan kebutuhan pokok seperti pangan sandang dan kebutuhan pokok lainnya.,

Adapun hasil program dan kegiatan Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu dapat digambarkan sebagai Berikut :

1. Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Untuk dapat mencapai misi kedua, yaitu meningkatkan peran perdagangan sebagai sektor penggerak yang kuat dalam perekonomian daerah, serta dapat mencapai tujuan, yaitu meningkatnya kontribusi sektor industri dan perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, maka ditetapkan sasaran strategis yang kedua, yaitu meningkatnya kontribusi sub sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah. Dalam sasaran strategis yang kedua ini, terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat diukur dengan rumusan/formula tertentu, adapun pencapaian target kinerja atas sasaran strategis kedua serta analisa dari kedua Indikator Kinerja Utamanya, akan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.11: Perbandingan Capaian Kinerja dengan target Disperindag

No	Uraian	Target	Pencapaian	Persentase
1	jumlah Produk yang diawasi	2 Produk	2 Produk	100

2	Jumlah Bahan bernbahaya yang diawasi	2 Bahan	2 Bahan	100
3	Cakupan bina kelompok pedagang /Usaha informal	3 Klpk	3 Klpk	100
4	Fasilitasi sarana prasarana perdagangan dalam negeri dan sistem distribusi pedagang	10 Kali	1 Kali	10
5	Operasi pasar dalam rangka stabilitasi harga pangan pokok	10 kali	6 kali	60
6	Koefiensi Kesetabilan Harga	<10	5,98	59,8

Pada table diatas dapat kila lihat bahwa untuk produk yang diawasi pada tahun 2020 terdapat 2 produk, sedangkan target kita pengawasan sebanyak 2 Produk untuk semua produk sebagai mana aturan yang berlaku produk yang diawasi sebanyak 23 macan produk dimana dari target sudah mencapai realisasi 100 % tetapi bila dilihat dari semua yang diawasi secara khusus hanya mencapai 8,68% hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran sehingga kegiatan dilakukan hanya dari penerimaan laporan atau keluhan yang terjadi ditambah lagi dengan adanya pandemic covid sehingga kegiatan yang berbentuk kunjungan dan perjalanan dinas ditiadakan.

Untuk pembinaan kelompok dilakukan di 3 tempat yaitu pasar panorama, Pasar minggu dan pasar Baru koto, sedangkan operasi pasar yang dlakukan sebanyak 6 kali sedangkan target yang harus terealisasi sebanyak 10 Kali, dengan demikian hanya 60 Persen pencapaian operasi pasar yang dilaksanakan,

2. Bidang Perdagangan Luar Negeri

Tabel 3.12: Perbandingan Capaian Kinerja dengan target Disperindag

No	Uraian	Target	Capaian	Persentase
1	Nilai Espor produk pertanian dan kehutanan	330 Milyar	165 Milyar	50
2	Nilai Ekspor produk industri dan pertambangan	2,250.T	1.399 T	62,17
3	Fasilitasi Pemasaran Produk Ekspor	2 Kali	1	50
4	Jumlah konfrensi Kopi Daerah Internasional	1 Event	1 Event	100
5	Nilai Impor	1,155	1,740	50,6
6	Jumlah Ekspor tahun 2019	1,758 801.862.575,-		
7	Jumlah Ekspor tahun 2020	1,399. 826.733.660,-		

Pada program perdagangan luar Negeri ada beberapa kegiatan pokok yang dilaksanakan, yang dapat menjadi penunjang terhadap hasil sub kontribusi perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, pencapaian kegiatan tersebut

sebagaimana telah digambarkan dalam table diatas, yaitu : Pencapaian ekspor produk pertanian dan kehutanan dari yang telah ditetapkan sebesar 330 milyar hanya mencapai 165 milyar atau 50 persen dari target, begitu juga jumlah nilai ekspor produk industry dan pertambangan dari target yang ditetapkan sebesar Rp, 2.250 Milyar hanya mencapai 62,17persen atau sebesar Rp.1.399 Milyar.

Tetapi hasil berbanding terbalik dengan pencapaian Impor dimana target yang ditentukan sebesar 1,155 Milyar malah meningkat sebesar 1,740 atau ada kenaikan 50,5 persen, hal ini karena disebabkan banyaknya permintaan bahan pembangunan seperti Aspal dan lainnya dalam rangka pemerintah sedang melaksanakan pembangunan Infrastruktur jalan.

Ada 2 kegiatan yang indikator penilaian kinerjanya, dilakukan dengan Indeks kepuasan, baik kepuasan pelanggan dan kepuasan masyarakat, Penilaian indeks ini berhubungan dengan Ekspor maupun Impor. Pada tahun 2020, kegiatan ini tidak dilaksanakan, dikarenakan tidak adanya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.

Dalam kegiatan promosi fasilitasi yang dilakukan Disperindag provinsi dari produk unggulan daerah dan produk strategis untuk Ekspor, seperti : CPO dan turunannya, Kopi, Udang tambak dan hasil pertanian belum dapat dilakukan secara maksimal pada tahun 2020 dikarenakan tidak adanya anggaran dalam pelaksanaannya, Namun demikian dalam program ini ada beberapa kegiatan yang dapat dilaksanakan walaupun tidak tersedianya anggaran antara lain :

- a. Berkerja sama dengan Bengcoolen dalam acara hari kopi Internasional yang dilaksanakan 1 Oktober sampai dengan 3 Oktober 2020 dalam mempromosikan dan konferensi kopi.
- b. Melaksanakan misi dagang ke Dubai, Malaysia, Singapura, Shanghai, India, secara Virtual dengan komoditi : sawit dan Turunannya, Fashion, Jeruk kalmansi dan kopi.

Dilihat dari Peningkatan dan pengembangan Ekspor perdagangan realisasi ekspor menurut jumlah perusahaan dan jumlah asset yang dimiliki dapat dilihat seperti table dibawah ini :

Tabel.3.13: Realisasi kegiatan Ekspor

N	uraian	Tahun
---	--------	-------

LAKIP 2020

Dinas Perindustrian dan perdagangan Provinsi Bengkulu

o		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Perusahaan pelaku Ekspor	18	20	21	22	17
2	Jumlah Aset dan omset Perusahaan Pelaku dalam rupiah	865 M	2.303M	2.218M	1.758M	1.399M
3	Negara Tujuan Ekspor	Malaysia Singapura	Malaysia Cina Singapura Uni emirat arab, Tiongkok Jepang , USA	Singapura tiongkok Jepang, Malaysia Thailan.	Tiongkok, Malaysia korea sel jepang USA, Thailan, singapura Jerman Australia Taiwan Hongkong Taiwan Belgia Australia Swiss	Singapura Thailan tiongkok Jepang Malaysia USA Belanda Korea sel Belgia Jerman Taiwan hongkong Inggris.
4	Pruduk Ekspor	Batu Bara, Karet, Cangkang sawit	Batu bara, Karet , Cangkang sawit, Pasir Besi, Damar Batu, Kopi	Batu bara, Karet , Cangkang sawit, Pasir Besi, Damar Batu, Kayu olahan	Batu bara, Karet , Cangkang sawit, Pasir Besi, Damar Batu, kayu olahan, Arang serbuk, kayu manis	Batu bara, Karet , Cangkang sawit, Kayu olahan, Arang serbuk.

Sumber : Pemberitahuan Ekspor Barang Bengkulu dan Surat keterangan Asal

Di table dapat dilihat bahwa dalam tahun 2020 terjadi penurunan realisasi jumlah ekspor sebesar 20,5% dari Rp. 1.758,801, 862, 575,- menjadi Rp. 1.399,826,733,660,- dan lebih baik dari tahun 2019 yang penurunannya sebesar 20,8% dari tahun 2018. Penurunan ini disebabkan karena adanya wabah covid 19 Dampaknya adalah penurunan utilisasi. Hal ini diakibatkan oleh turunnya permintaan dan penjualan pada beberapa industri. Kemudian, terjadi PHK akibat dari kapasitas produksi yang menurun, harga bahan baku dan penolong naik karena asal negara impor yang terbatas aksesnya, kurs dolar yang meningkat,

serta adanya larangan untuk beroperasi bagi industri di beberapa macam produk dan wilayah.

Tabel.3.14: Ralisasi Impor

No	uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Perusahaan pelaku Impor	-	-	19	6	2
2	Jumlah Aset dan omset Perusahaan Pelaku					
3	Pruduk Impor	Aspal.	Aspal , Peralatan, Mesin cetak, Barang Pabrik., Mesin, Barang kosumsi barang Kontruksi	Aspal, Barang kontruksi	Turbin Listrik, Aspal	Aspal, Blus, kalender cetak, Telpn seluler, Arloji, Alat pancing, Aksesoris pakaian jadi, Mesin, perkakas, barang lainnya.

Realisasi capaian outcome Persentase Peningkatan Nilai Ekspor kegiatan ini belum terlaksana dengan baik karena belum mencapai target peningkatan dan pengembangan ekspor yang ditargetkan Naik 16%, justru turun menjadi 20,5%. dari tahun sebelumnya

Begitu juga dengan Impor yang diharapkan terjadinya penurunan permintaan, tetapi malah terjadi peningkatan dari Rp. 1.371,6 Milyar Pada tahun 2019. Dan pada tahun 2020 sebesar Rp. 127,8 Milyar , ini menunjukkan adanya Penurunan Impor untuk provinsi Bengkulu sebesar 90,6%

Bila dilihat dari perbandingan tahun sebelumnya terjadi penurunan Impor sebesar 90,6persen sedangkan bila dilihat dari target yang telah ditetapkan terjadi peningkatan jumlah impor sebesar 50,6%.

3. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Realisasi capaian outcome Indeks kepuasan Konsumen tidak tercapai, sehubungan dengan belum terlaksananya pengujian dikarenakan belum siapnya produk hukum yang dipakai oleh UPTD PPMB untuk pengujian barang pada tahun 2020 yang berdampak tidak tercapainya output program

perlindungan konsumen dan perdagangan (nilai indeks kepuasan konsumen sebesar 79). Hal ini disebabkan tidak ada pelayanan pengujian sampel.

Dalam sasaran strategis yang ketiga ini, terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat diukur dengan rumusan/formula tertentu, adapun pencapaian target kinerja atas sasaran strategis ketiga serta analisa dari Indikator Kinerja Utamanya, akan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.15: Nilai SAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Capaian					Kategori
	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
Nilai Sakip Disperindag	A	B	BB	BB	BB	BB	Baik

Tabel 3.16 : Pencapaian Kinerja Sasaran III Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2020	Realisasi 2020
1	2	3	4	5
2	Meningkatnya Capaian Kinerja OPD	Nilai Sakip Disperindag	A	BB

Tabel 3.17 : Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran III

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi 2020	Realisasi 2020 (Asumsi)
1	2	3	4	5	6
2	Meningkatnya Capaian Kinerja OPD	Nilai Sakip Disperindag	A	BB	A

Tabel 3.18 : Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2020 (Asumsi)
1	2	3	4	5
2	Meningkatnya Capaian Kinerja OPD	Nilai Sakip Disperindag	A	BB

Tabel 3.19 : Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2020 (Asumsi)	Realisasi Nasional	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Capaian Kinerja OPD	Nilai Sakip Disperindag	BB	B	

A.2. Sasaran Strategis Pertama “Meningkatnya kontribusi sektor Industri Terhadap Perekonomian Daerah.

Misi/Sasaran	Uraian
Misi Pertama	Meningkatkan Produktivitas, Daya Saing dan Kemandirian Industri berbasis unggulan daerah yang sistematis, berkelanjutan dan terintegrasi
Sasaran ke-1	Dalam upaya meningkatnya kontribusi sub sektor industri terhadap perekonomian daerah diarahkan pada peningkatan jumlah unit usaha industri sedang besar dan IKM dan peningkatan jumlah wirausaha baru. Capaian kinerja sasaran ke-1 mendapat predikat dengan capaian rata-rata pada kategori Baik dengan rata-rata persentase capaian 99,10 persen. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran sasaran ke-1 melalui indikator, Persentase kontribusi sub sektor industri terhadap PDRB dengan kategori Baik

Indikator Kinerja Utama “Persentase kontribusi sub sektor industri terhadap PDRB”

Terkait hal tersebut diatas, berdasarkan kinerja indikator “Persentase kontribusi sub sektor industri terhadap PDRB” didapat hasil bahwa Kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020 adalah sebesar Rp.557,8 trilyun atau sebesar 19,86 persen dari total PDRB – ADHB yang tercatat sebesar Rp.2720,6 trilyun atau lebih rendah dari target yang ditetapkan ,sebagaimana pada sasaran strategis satu, indikator kinerja utama, sehingga persentase capaiannya hanya sebesar 5,25 persen.untuk nasional dan 6,06 persen untuk pencapaian provinsi Bengkulu

Dilihat dari persentase pencapaian provinsi Bengkulu untuk Persentase kontribusi sub sektor industri terhadap PDRB Nasional masih diatasnya.

Pencapaian kinerja sektor industri masih diatas pencapaian nasional walaupun di target provinsi belum mencapai target yaitu 96,03 % dari target yang ditentukan

yaitu sebesar 6,31% dan itu dibawah rata rata pencapaian di lima tahun terakhir., hal ini disebabkan karena adanya wabah Covid 19, di dunia, hingga ke Provinsi Bengkulu yang melumpuhkan hampir seluruh sektor ekonomi seperti sektor industri. Dampaknya adalah penurunan utilisasi. Hal ini diakibatkan oleh turunnya permintaan dan penjualan pada beberapa industri. Kemudian, terjadi PHK akibat dari kapasitas produksi yang menurun, harga bahan baku dan penolong naik karena asal negara impor yang terbatas aksesnya, kurs dolar yang meningkat, serta adanya larangan untuk beroperasi bagi industri di beberapa macam produk dan wilayah.

Berdasarkan data BPS atas harga berlaku secara kumulatif nilai PDRB ADHB sektor industri pengolahan Provinsi Bengkulu pada tahun 2020 mencapai Rp 672,74 Milyar memberikan kontribusi sebesar 0,12 persen terhadap PDB ADHB sektor industri pengolahan nasional yang mencapai nilai sebesar Rp 557,8 trilyun pada tahun 2020, adapun perbandingannya dapat dilihat pada grafik diatas Industri pengolahan Bengkulu Tahun 2020 mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 37,9 persen bila dibandingkan Tahun 2019.

Beberapa analisa dari program/kegiatan pendukung pencapaian sasaran strategis ke-1 diantaranya sebagai berikut:

- a. Jumlah sentra industri yang dibina dalam gerakan pemberdayaan industri. Jumlah sentra industri yang dibina pada tahun 2020 sejumlah 14 Sentra walau saat ini sebagian berhenti berproduksi karena menurunnya permintaan pasar yang disebabkan karena adanya wabah virus covid 19 yang melumpuhkan perekonomian terutama isangat berpengaruh terhadap Industri Kecil dan menengah.
- b. Dukungan persebaran dan penguatan industri. Merupakan indikator dalam rangka melakukan kegiatan pembinaan industri Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu. Dengan target sebanyak 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota atau sebanyak 102 sentra IKM , dimana pembinaan industri di Provinsi Bengkulu dilakukan baik melalui APBD dan APBN dengan tetap memperhatikan Protokol Kesehatan dalam menghadapi virus corona, pembinaan yang dilaksanakan ini dapat mendorong persebaran pengembangan industri di Provinsi Bengkulu terutama IKM dan industri unggulan Provinsi Bengkulu kedepan misalnya pada tahun 2020 ada 3 sentra tenun yang mendapat bantuan alat tenun jangkar yaitu sentra tenun Bumpak di Seluma, Tenun Kaur di Pondok Pusaka kaur, dan Sentra tenun Rejang di Rejang Lebong. Selain itu dilakukannya Bimtek Hand Sanitizer, Produksi Masker dan

Produksi Minuman Herbal yang di lokuskan di 10 Kabupaten Kota, untuk menciptakan WUB dan juga membantu IKM sandang memproduksi masker untuk menghadapi dampak Pandemi Covid 19 yang hampir melumpukan seluruh Kegiatan Industri seperti IKM.

Jumlah industri unggulan provinsi yang difasilitasi. Industri unggulan Provinsi Bengkulu yang dikembangkan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dan merupakan komoditi unggulan daerah sesuai dengan Prioritas Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021, yaitu:

- Industri pengolahan sawit walaupun sebagian besar berhenti berproduksi, tetapi ada beberapa Pabrik pengolahan sawit yang tetap berproduksi untuk memenuhi kebutuhan pasar seperti India.
 - Industri pengolahan hasil tanaman pangan Kopi masih tetap berproduksi karena permintaan kopi lokal untuk konsumsi masyarakat di Provinsi Bengkulu tetap.
- c. Dukungan kebijakan pengembangan industri yang disediakan. Dengan telah rampungnya naskah akademis PERDA RPIP Bengkulu 2017 – 2037 maka pada tahun 2020 telah dilakukan penggantian atas RPIP yang telah selesai sekaligus Peraturan gubernur yang mengatur kegiatan tersebut, sehingga perlu lagi dilakukan sosialisasi atas aturan tersebut walaupun saat ini pembangunan kawasan Industri sementara berhenti akibat dampak pandemi Covid 19.
- d. Dukungan pengembangan Kawasan Terpadu Dekranasda Provinsi Bengkulu. Dalam rangka mendorong tumbuh kembangnya sektor industri kerajinan daerah dan mendorong DEKRANASDA untuk memfasilitasi pemasaran dari industri kerajinan daerah sebagai sentra kerajinan berbasis kearifan lokal sekaligus menjadi showroom produk kerajinan daerah dari 10 Kab/Kota. Kawasan ini juga merupakan sentra kerajinan yang disiapkan sebagai salah satu destinasi wisata 2020, walaupun jumlah kunjungan konsumen menurun akibat dampak pandemi Covid 19.

Beberapa analisa kegagalan yang menjadi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran strategis diantaranya sebagai berikut:

- a. Akibat dampak pandemi covid 19, membuat permintaan hasil dari produk Industri pengolahan sawit, Industri pengolahan karet, menurun drastis di Provinsi Bengkulu karena rendahnya permintaan dari negara-negara pengimpor seperti China dan India, serta negeri Uni Eropa

- b. Tidak tercapainya target jumlah pertambahan industri Provinsi Bengkulu yang signifikan dikarenakan belum optimalnya hilirisasi industri di Provinsi Bengkulu dan juga yang paling utama adalah dampak dari Covid 19 yang membuat permintaan konsumen akan produk IKM menurun drastis, sehingga banyak IKM yang berhenti berproduksi bahkan tutup serta memPHK para pekerjanya.
- c. Masalah permodalan juga menjadi permasalahan tersendiri dalam rangka penumbuhan dan pengembangan industri kecil menengah di Provinsi Bengkulu
- d. Tingginya ketergantungan wirausaha baru terhadap bantuan permodalan dan mesin/peralatan produksi kepada Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya menyebabkan belum maksimalnya peningkatan produksi yang mempengaruhi peningkatan kapasitas IKM secara keseluruhan. Hal tersebut juga mempengaruhi calon wirausaha dimana belum semua calon wirausaha untuk mengurus IUMK;
- e. Beberapa kelompok usaha baru (KUB) dari beberapa sentra industri masih kesulitan modal dalam pengurusan akta notaris yang merupakan salah satu prasyarat diterimanya bantuan mesin/peralatan produksi dari Pemerintah terutama Pemerintah Daerah sehingga membuat IKM sulit berkembang dan naik kelas dalam skala usahanya saat ini. Hal menyebabkan pertambahan industri di Provinsi Bengkulu pada Tahun 2020 hanya pada industri mikro dan rumah tangga yang tidak memiliki legalitas formal.

Terkait hambatan dan kendala tersebut diatas, beberapa upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah khususnya pemerintah pusat melalui kementerian Perindustrian melakukan tugas perbantuan yang diberikan kepada provinsi Bengkulu pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp 1.733.690.000. untuk mendorong Pelaksanaan program bidang industri di tengah menghadapi pandemi Covid-19
- b. Berikutnya, program pengadaan mesin dan peralatan IKM, meningkatkan kemampuan sentra dan penguatan produk IKM logam, mesin, elektronika dan alat Angkut yang terdampak Covid-19.
- c. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu melalui dana Dekonsentrasi APBN melaksanakan Bimtek Produksi Masker, Minuman Herbal/Imun Penguat Tubuh dan Pembuat Hand Sanitizer bagi IKM terdampak

Covid 19 untuk menciptakan WUB dan mendorong IKM sandang seperti pengrajin batik besurek membuat masker dari bahan kain batik besurek.

- d. Memfasilitasi akses permodalan bagi wirausaha baru dan IKM unggulan dengan melakukan kerjasama dengan perbankan nasional/daerah, BUMN/BUMD dan instansi terkait permodalan usaha;
- e. Memfasilitasi pengurusan akta notaris bagi kelompok usaha baru yang sudah dilatih agar dapat memberikan bantuan hibah mesin/peralatan produksi kepada wirausaha baru dan IKM di Provinsi Bengkulu

A.3.Sasaran Strategis Kedua “Meningkatnya kontribusi sub sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah”

Misi/Sasaran	Uraian
Misi Kedua	Meningkatkan peran perdagangan sebagai sektor penggerak yang kuat dalam perekonomian daerah
Sasaran ke-2	Dalam upaya meningkatkan kontribusi sub sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah diarahkan pada peningkatan unit usaha perdagangan dan peningkatan kontribusi sektor perdagangan dalam negeri terhadap perekonomian daerah. Capaian kinerja sasaran ke-2 mendapat predikat dengan capaian rata-rata pada kategori sangat baik dengan rata – rata persentase capaian 98,06 persen. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran melalui indikator dengan kategori Baik

Untuk dapat mencapai misi kedua, yaitu meningkatkan peran perdagangan sebagai sektor penggerak yang kuat dalam perekonomian daerah, serta dapat mencapai tujuan, yaitu meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, maka ditetapkan sasaran strategis yang kedua, yaitu meningkatnya kontribusi sub sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah. Dalam sasaran strategis yang kedua ini, terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat diukur dengan rumusan/formula tertentu, adapun pencapaian target kinerja atas sasaran strategis kedua serta analisa dari kedua Indikator Kinerja Utamanya, akan diuraikan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama “Kontribusi Sektor Perdagangan pada PDRB”

Pertumbuhan sub sektor perdagangan tahun 2020 tercatat sebesar 14,31 persen atau lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 15.45 persen,

sebagaimana pada sasaran strategis II, indikator kinerja utama yaitu kontribusi Sektor Perdagangan pada PDRB, sehingga persentase capaiannya sebesar 92,62 Persen Bengkulu mengalami trend cenderung menurun. Hal ini dapat dilihat pada pertumbuhan sub sektor perdagangan di Bengkulu pada tahun 2020 pertumbuhan sub sektor perdagangan sebesar -0,83%, berada pada titik terendah. Sedangkan tahun 2016 pertumbuhan sub sektor perdagangan sebesar 7.82%. Pertumbuhan sub sektor perdagangan yang tumbuh melambat sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 dikarenakan adanya krisis global yang berdampak pada daya jual beli masyarakat. Di tahun 2017 kembali meningkat menjadi 8.70 % jauh melampaui pertumbuhan sub sektor perdagangan nasional yang mencapai 4.62 %, namun di tahun 2018 berfluktuasi dan melambat menjadi 7.92%. Sedangkan pada tahun 2019 kembali meningkat Trend pertumbuhan sub sektor perdagangan Bengkulu hampir selalui melampaui trend pertumbuhan sub sektor perdagangan Nasional

Beberapa analisa keberhasilan dari program/kegiatan pendukung pencapaian sasaran strategis ke-2 diantaranya sebagai berikut:

- a. Konsistensi Kegiatan Pelaksanaan Pasar Murah menghadapi Hari Besar Keagamaan setiap tahunnya.

Merupakan kegiatan yang dirancang dan dimaksudkan untuk menyediakan barang-barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (pra sejahtera) pada saat menjelang perayaan hari-hari besar keagamaan nasional. Melalui kegiatan ini sekaligus merupakan bentuk kepedulian Pemerintah dalam membantu dan menjaga daya beli masyarakatnya yang berpenghasilan rendah, sekaligus sebagai upaya untuk menekan dampak kenaikan harga barang kebutuhan pokok menjelang menjelang perayaan hari-hari besar keagamaan nasional. Selain itu, dengan penyelenggaraan pasar murah diharapkan dapat menjaga lonjakan inflasi di daerah khususnya di Provinsi Bengkulu.

Beberapa komoditi yang dijual pada kegiatan pasar murah merupakan bahan kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti beras, gula, minyak goreng, tepung terigu, susu kental manis, sirup, mentega, tepung gula dan kacang tanah. Selain itu juga pada beberapa lokasi beberapa komoditi lain yang diperlukan oleh masyarakat, seperti kacang atom, kacang medan, telur, dan beberapa barang kebutuhan masyarakat lainnya.

- b. Monitoring Stok Bahan Pokok Strategis yang aktif dilaksanakan setiap hari selama 5 (lima) hari kerja.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk melakukan pemantauan sekaligus mengumpulkan/ memperoleh informasi dan data tentang kondisi stok (persediaan) barang kebutuhan pokok (sembako) dan barang strategis lainnya. Ketersediaan informasi dan data tentang stok tersebut sangat penting dalam rangka menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan barang sehingga stabilitas harga barang-barang tersebut dapat terjaga. Selain itu dengan adanya informasi dan data mengenai ketersediaan stok bahan kebutuhan dan barang strategis lainnya akan menjadi salah satu bahan/dasar dalam menyusun/ mengambil kebijakan untuk menekan serta mencegah terjadinya lonjakan inflasi di daerah.

Pada Tahun Anggaran 2020, pemantauan stok bahan kebutuhan pokok difokuskan pada beberapa komoditi, antara lain beras, gula, minyak goreng, mentega, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, susu kental manis, tepung terigu, kacang kedelai, bawang putih. Sedangkan untuk barang strategis lainnya yang dilakukan pemantauan stok adalah Semen. Untuk memperoleh informasi dan data tentang stok sembako dan barang strategis lainnya dilakukan melalui kerjasama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu dengan beberapa perusahaan/distributor yang ada di wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya.

Melalui kegiatan Monitoring Stok Bahan Pokok Strategis juga dilaksanakan rapat/ pertemuan dengan pelaku usaha dan *stakeholder* terkait guna membahas hal-hal yang terkait dengan kondisi ketersediaan, harga dan hal-hal lain yang terkait dengan kelancaran pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di Provinsi Bengkulu

- c. Partisipasi aktif dalam kegiatan promosi produk dalam negeri dan penyelenggaraan Bengkulu Expo setiap tahun.

Produk yang dipromosikan dalam Negeri, yaitu melalui Kegiatan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri Tahun Anggaran 2020 dimaksudkan untuk memberikan wadah bagi UMKM yang potensial di Bengkulu dalam mempromosikan produk-produk yang dihasilkannya sehingga diharapkan dapat memperluas jaringan pemasaran yang akan berdampak pada semakin berkembangnya UMKM-UMKM potensial di Provinsi Bengkulu, seperti memberikan akses pasar dan promosi produk UKM unggul dalam menghasilkan produk berkualitas, bermutu, membangun merk sendiri,

meningkatkan jejaring pemasaran antar peserta sehingga mampu bersaing di pasar dalam negeri secara regional maupun pasar global.

Dan melalui penyelenggaraan Bengkulu Expo yang diselenggarakan setiap 1 tahun sekali pada ulang tahun Provinsi Bengkulu.

d. Pelaksanaan Monitoring dan pembinaan pasar secara berkala;

Monitoring dan Pembinaan Pasar Tradisional merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi yang *up to date* mengenai kondisi dan perkembangan sarana distribusi perdagangan (seperti pasar tradisional, pasar modern dan gudang) serta untuk memfasilitasi pemerintah kabupaten/kota dalam mengajukan permohonan bantuan pembiayaan untuk pembangunan maupun revitalisasi/renovasi pasar tradisional kepada Pemerintah Pusat sekaligus melakukan pemantauan/monitoring perkembangan pemanfaatan alokasi DAK dan Tugas Pembantuan bidang sarana perdagangan yang diterima oleh pemerintah kabupaten/kota.

e. Memfasilitasi penerbitan rekomendasi untuk mendukung permohonan bantuan kepada pemerintah pusat dalam rangka pembangunan pasar tradisional/pasar rakyat dan pembangunan sarana kemetrolgian pada beberapa kabupaten/kota. Untuk tahun 2020, terdapat 17 (tujuh belas) pasar yang tersebar di 7 (tujuh) Kabupaten/kota yang difasilitasi penerbitan rekomendasi untuk mendapatkan dana DAK Tahun 2020 yaitu walaupun pada akhirnya di recofusing oleh pusat untuk penanganan dampak pandemi covid:

f. Peningkatan Pengawasan Barang Beredar

Merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya aspek keamanan, keselamatan, kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup, diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban masing-masing. Pengawasan barang dan/atau jasa dilaksanakan oleh Tim Operasional dan Tim Terpadu di pasar tradisional dan pasar modern. Pengawasan dimaksud dilaksanakan dengan memeriksa kesesuaian atau pemenuhan terhadap persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI), label, serta mengawasi produk yang tidak layak konsumsi, misalnya dalam bentuk kemasan yang sudah rusak ataupun kadaluarsa. Total barang yang diawasi disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang mencapai 85% dari total barang yang beredar dimasyarakat.

Selain pengawasan terhadap barang yang diperjualbelikan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu juga melaksanakan pembinaan kepada para pedagang/pelaku usaha dengan memberikan

masuk sekaligus informasi mengenai barang-barang yang layak dan tidak layak untuk dijual sehingga kepentingan konsumen dan produsen sama-sama terlindungi. Kegiatan pengawasan terhadap barang yang beredar di masyarakat dilakukan melalui pengawasan secara kasat mata yang dilaksanakan secara berkala maupun sewaktu-waktu, yaitu pada hari-hari biasa dan saat menyambut hari besar keagamaan. Apabila dalam pelaksanaan pengawasan ditemukan barang yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka akan dilakukan pembelian sampel barang/produk untuk selanjutnya dikirim ke laboratorium pengujian yang telah terakreditasi.

- g. Peningkatan Monitoring dan Pengawasan Barang-barang dalam Pengawasan, Kegiatan Monitoring dan Pengawasan Barang-Barang dalam Pengawasan Tahun Anggaran 2020 dimaksudkan untuk menjaga ketertiban perdagangan barang-barang yang penting untuk kehidupan perekonomian, khususnya terhadap beberapa barang/ produk yang telah ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan seperti gula, minuman beralkohol, bahan berbahaya dan pupuk bersubsidi. Kegiatan ini merupakan bentuk dari upaya Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk menjamin ketersediaan dan keamanan dari barang-barang yang beredar di masyarakat.

- h. Optimalisasi Penyelenggaraan BPSK Provinsi

Sebagai upaya pembinaan terhadap BPSK yang telah terbentuk sebelum Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditetapkan, konsultasi dan koordinasi ke BPSK ke Kabupaten yang telah terbentuk di Kabupaten untuk memperoleh informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan kegiatan BPSK dalam melaksanakan perlindungan konsumen serta hambatan dan kendala yang mungkin ditemui sekaligus untuk mengetahui permasalahan/pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat.

Selanjutnya terhadap Kabupaten yang belum membentuk BPSK, maka melalui kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Konsumen ini didorong dan difasilitasi untuk segera membentuk BPSK.

Beberapa analisa kegagalan yang menjadi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran strategis ke-2 diantaranya sebagai berikut:

1. Tidak tercapainya target Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang terbentuk disebabkan oleh tidak dapat dilaksanakannya Pembentukan BPSK di Kab/Kota melalui Keputusan Presiden. Karena adanya wabah corona Hal tersebut tidak dapat dilaksanakannya perekrutan anggota dan sekretariat BPSK yang baru maupun BPSK yang telah habis masa berlakunya. Peralihan kewenangan dari Kab/Kota menjadi kewenangan Provinsi juga mengharuskan

Pemerintah Provinsi mengalokasikan dana untuk perekrutan anggota dan sekretariat BPSK serta operasional BPSK di Kab/Kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sub urusan perlindungan konsumen sepenuhnya menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut, maka terhitung sejak 2 Oktober 2016 segala kegiatan yang terkait dengan perlindungan konsumen tidak lagi menjadi kewajiban pemerintah kabupaten/kota, termasuk pengangkatan, pemberhentian, pembinaan serta pembiayaan operasional Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kabupaten/kota. Lebih lanjut, Kementerian Perdagangan masih mempersiapkan peraturan-peraturan yang akan mengatur tentang mekanisme serta hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan kewenangan perlindungan konsumen oleh Pemerintah Provinsi.

2. Beberapa pemerintah daerah belum memiliki data yang lengkap mengenai kondisi pasar tradisional, pasar modern, maupun sarana gudang yang ada di wilayahnya. Bahkan masih terdapat daerah yang belum memiliki data gudang di wilayahnya
3. Belum maksimalnya penyajian data Informasi Perdagangan berupa Jumlah SIUP, TDP dan TDG yang terdata karena belum terakomodirnya kegiatan pengolahan entry data di anggaran karena keterbatasan anggaran. Berdasarkan informasi dan hasil pengumpulan data yang telah dilaksanakan, diketahui bahwa secara umum pelaksanaan penerbitan SIUP, TDP maupun TDG pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu telah dilimpahkan/dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani urusan perizinan/pelayanan terpadu, baik yang berdiri sendiri dalam bentuk Kantor Pelayanan Perizinan maupun yang menjadi bagian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu. Dengan adanya pelimpahan tersebut semakin memberikan kemudahan bagi masyarakat atau pelaku usaha untuk memperoleh perizinan yang diperlukan. Namun demikian, di sisi lain juga muncul persoalan baru yang terkait dengan masih kurangnya koordinasi antara unit/instansi yang menerbitkan SIUP, TDP dan TDG dengan instansi yang mengurus perdagangan pada kabupaten/kota (selaku instansi teknis yang bertanggung jawab dalam pembuatan SIUP dan TDP). Hal ini terlihat dari belum semua instansi teknis (Dinas Urusan Perdagangan) yang ada di daerah yang memiliki serta dapat menyampaikan data/laporan secara rutin kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dikarenakan tidak lancarnya input laporan dari instansi penerbit.
4. Belum maksimalnya pembinaan dan sosialisasi terkait Jumlah gudang dengan sistem resi gudang karena keterbatasan anggaran. Sebagai upaya untuk terus menciptakan kepastian berusaha dan mendorong kelancaran distribusi barang yang diperdagangkan, maka Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah

menerbitkan kebijakan baru terkait sarana pergudangan yang ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang, yang menggantikan sekaligus mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/MDAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang dimana salah satu pokok perubahannya adalah pengaturan mengenai klasifikasi gudang yang lebih tegas dan jelas karena telah mengakomodir ketentuan mengenai klasifikasi gudang terbuka maupun gudang tertutup, termasuk indikator klasifikasi yang diperjelas dengan kriteria luas dan indikator volume. Namun kebijakan tersebut belum maksimal dilakukan karena keterbatasan anggaran yang mendukung kinerja sub sektor perdagangan dalam negeri.

Terkait hambatan dan kendala tersebut diatas, beberapa upaya dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Penyelenggaraan BPSK dengan mempercepat proses pembentukan BPSK untuk memfasilitasi jumlah pengaduan konsumen. Jumlah BPSK yang terbentuk, dilakukan melalui Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Konsumen merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk membentuk dan menumbuh kembangkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang berperan dalam penyelesaian sengketa antara Pelaku Usaha dengan konsumen dilindungi pemerintah kabupaten/kota.
2. Pembangunan sistem informasi perdagangan berbasis informasi teknologi yang dapat menyajikan data secara komprehensif dan real time serta dilakukannya pemuktahiran data yang terintegrasi antara dinas perdagangan kabupaten/kota dengan provinsi terkait data informasi pasar dan data dukung lainnya;
3. Perlu dilakukan Kegiatan Fasilitasi Pengolahan Entry Data SIUP, TDP dan TDG merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk memperoleh data yang up to date terkait pendaftaran perusahaan dan perkembangan kegiatan usaha melalui penerbitan SIUP dan TDG, yang ada pada kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu sekaligus memperoleh informasi dan masukan terkait dengan permasalahan dan kondisi yang dihadapi oleh kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan pendaftaran perusahaan dan penerbitan SIUP maupun TDG sehingga dapat terwujud kesamaan persepsi dan pemahaman dalam memaknai maksud dan tujuan setiap pendataan SIUP, TDP dan TDG bagi perkembangan dunia usaha di daerah, khususnya di Bengkulu

4. Perlu diadakan sosialisasi dan pembinaan terkait penerapan sistem resi gudang. Kegiatan Sosialisasi Penerapan Sistem Resi Gudang dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang pemanfaatan sistem resi gudang sehingga mampu menciptakan/memperkuat daya tawar-menawar petani sekaligus menciptakan efisiensi di dunia agrobisnis, dimana petani bisa menunda penjualan komoditi setelah panen, sambil menunggu harga membaik kembali, dengan menyimpan hasil panen mereka di gudang-gudang tertentu yang telah memenuhi persyaratan. Sedangkan secara spesifik kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi, wawasan dan pemahaman yang lebih komprehensif kepada para petani/kelompok tani, khususnya di wilayah Kabupaten Kepahiang, terkait dengan mekanisme dan tata cara penerapan Sistem Resi Gudang, termasuk manfaat yang akan diperoleh apabila menggunakan sistem resi gudang. Selain itu, dengan pelaksanaan sosialisasi tersebut diharapkan dapat menjadi wadah untuk memperoleh informasi terkait permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh para petani/kelompok tani dan para stakeholder terkait dengan belum berjalannya Sistem Resi Gudang, sekaligus untuk mencari solusi dan upaya yang perlu dilakukan guna percepatan pemanfaatan Gudang SRG di Provinsi Bengkulu.
5. Target peningkatan dan pengembangan ekspor yang ditargetkan 16%, justru turun 20,5%. Dari tahun sebelumnya Berdasarkan SKA yang diterbitkan , terjadinya penurunan ekspor industri pengolahan seperti CPO, karena adanya perang dagang antara China dan Amerika yang menyebabkan perlambatan perekonomian secara global. Dan adanya wabah covid 19 yang menyerang disemua Negara di dunia sehingga permintaan dari Negara pengimpor tidak dapat dilaksanakan seluruhnya , juga adanya kebijakan pemerintah yang menunda keluar masuknya barang selain produk kebutuhan pangan/ pokok .hal ini sangat dimaklumi dan untuk mengatasi hal tersebut yang dapat dilakukan adalah Perlunya diadakan pelatihan dan pendampingan kegiatan Ekspor bagi para eksportir untuk pembuatan surat-surat izin ekspor serta lebih diarahkan untuk ekspor barang jadi seperti kopi bubuk sebagai salah satu produk unggulan daerah Provinsi Bengkulu, karena harga produk jadi ekportirlah yang menentukan, tidak dipengaruhi rate harga internasional seperti produk batubara dan CPO.

A.4 Sasaran Strategis Ketiga “Meningkatnya Capaian Kinerja OPD”

Untuk dapat mencapai misi ketiga yaitu Meningkatkan Layanan Prima kepada Masyarakat melalui Kinerja Organisasi yang efektif dan Aparatur profesional, maka ditetapkan sasaran strategis yang ketiga, yaitu meningkatnya capaian kinerja OPD.

Misi/Sasaran	Uraian
Misi Ketiga	Meningkatkan Layanan Prima kepada Masyarakat melalui Kinerja

	Organisasi yang efektif dan Aparatur profesional
Sasaran ke-3	Dalam upaya meningkatnya capaian kinerja OPD tahun 2020 melalui nilai Sakip Disperindag yang mendapat predikat Baik dengan capaian rata-rata pada kategori “Baik.”

Analisa atas capaian indikator-indikator sasaran tiga adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama “Nilai SAKIP Disperindag”

Penetapan Indikator Kinerja Nilai SAKIP Disperindag Tahun 2020 dilaksanakan dalam rangka memaksimalkan peran kelembagaan dalam mendukung pencapaian kinerja perindustrian dan perdagangan melalui peningkatan capaian kinerja OPD Disperindag Provinsi Bengkulu. Asumsi capaian tahun 2020, diharapkan penilaian atas SAKIP OPD adalah kategori A.

Sebagai upaya untuk mencapai nilai tersebut diatas, langkah – langkah yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan review renstra 2016 – 2021 sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2017
2. Melakukan review renstra 2016 – 2021 sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2019
3. Melakukan review terhadap penetapan indikator kinerja utama OPD Perindag Tahun 2018 sebanyak 1 (Satu) kali
4. Melakukan review terhadap penetapan indikator kinerja utama OPD Perindag Tahun 2019 sebanyak 2 (Dua) kali
5. Melakukan penjenjangan indikator kinerja mulai dari eselon III dan IV yang merupakan penjabaran indikator kinerja utama eselon II
6. Melakukan review terhadap pencapaian IKU OPD setiap triwulan pada tahun berjalan
7. Melakukan evaluasi terhadap kinerja masing – masing indikator setiap semester
8. Melakukan penyesuaian kembali terhadap Restra, Renja, RKT, TAPKIN, Laporan Kinerja.

Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan dalam pencapaian indikator merupakan bentuk dukungan penuh terhadap internal organisasi dalam memfasilitasi dari sisi peningkatan SDM, penyusunan dokumen kerja, serta operasional perkantoran lainnya. Berikut ini realisasi

kinerja Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Realisasi capaian outcome Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan realisasi capaian sebesar 91,27% dari target yang ditetapkan didukung oleh pencapaian realisasi kinerja output terpenuhinya sejumlah pelayanan administrasi perkantoran dengan target sebanyak 14 jenis.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Realisasi capaian outcome Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan realisasi capaian sebesar 93,91% didukung oleh pencapaian realisasi kinerja output terpenuhinya jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang diadakan/dibangun/direhab/dipelihara dengan target sebanyak 45 unit

3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Realisasi capaian outcome Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan realisasi capaian sebesar 92,98 % didukung oleh pencapaian realisasi kinerja output Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan pelaporan yang disusun dengan target 10 dokumen.

Beberapa analisa keberhasilan dari program/kegiatan pendukung pencapaian sasaran strategis ke-3 diantaranya sebagai berikut:

1. Operasional Pelayanan Admistrasi Perkantoran,

Dukungan IKU di atas dimaksudkan untuk penilaian terhadap kinerja manajemen dalam mendukung pelaksanaan urusan perindustrian dan perdagangan di Provinsi Bengkulu. Program-program dilaksanakan oleh Sekretariat untuk menjamin lancarnya kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Bengkulu. IKU ini didukung program-program rutin perkantoran, dimana selama tahun 2020 operasional pelayanan kantor berjalan secara lancar, yang dapat dibuktikan dengan pencapaian IKU lainnya secara baik.

2. Jumlah Dokumen Perencanaan Indag Bengkulu,

Dokumen perencanaan bagi instansi Pemerintah termasuk Dinas Perindag Prov. Bengkulu memiliki fungsi yang sangat vital. Dokumen dimaksud bukan lagi sekedar untuk pengklasifikasikan mata kegiatan dan anggaran, tetapi juga memiliki

legalitas sebagai dasar hukum bagi instansi pemerintah untuk melaksanakan program dan kegiatan. Dengan demikian, dukungan terhadap penyusunan dokumen-dokumen tersebut perlu mendapatkan perhatian yang serius. Setiap tahun Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Bengkulu menyusun dua jenis Dokumen perencanaan yaitu Rencana Kerja (Renja) OPD dan dokumen Rencana Kegiatan Anggaran (RKA).

Beberapa analisa kegagalan yang menjadi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran strategis adalah kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis ini yaitu

1. belum tervalidasinya data industri dan perdagangan yang didapat melalui dinas yang menangani industri dan perdagangan di Kab/Kota. Hal tersebut menyebabkan masih perlunya validasi terlebih dahulu untuk dapat digunakan serta dikembangkan.
2. Belum adanya Payung hukum di Provinsi untuk menjadi Petunjuk teknis dalam pelaksanaan kegiatan yang strategis seperti Peraturan Gubernur untuk menjelaskan dan menjabarkan tentang Peraturan Pemerintah daerah yang telah ada maupun Peraturan Kementrian yang berhubungan dengan pelaksanaan dan tugas pokok program di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu.
3. Masih terkendalanya anggaran untuk program dan kegiatan yang digunakan untuk pelaksanaan , hal ini dikarenakan adanya Peralihan anggaran kegiatan yang digunakan untuk Penanganan Wabah Covid 19.
4. Belum adanya Peralatan yang Memadai untuk pelaksanaan kegiatan, sehingga dalam penentuan standarisasi pruduk belum Optimal.

Terkait hambatan dan kendala tersebut diatas, beberapa upaya dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian kinerja sasaran ini adalah

1. mendorong agar bidang dan melalui dinas yang menangani industri dan perdagangan di Kab/Kota dapat memvalidasi data-data sesuai dengan kewenangan yang ada sehingga peta spasial tersebut dapat dijadikan bahan dalam perencanaan, monitoring, evaluasi, serta pengambilan keputusan kedepannya.
2. Merencanakan dan dan berkerja sama dengan Instansi terkait guna penyusunan draf untuk Peraturan gubernur untuk kegiatan Perindustrian , perdagangan.dan penunjangnya di provinsi Bengkulu.

3. Tetap menganggarkan kegiatan dan Program pokok sebagaimana tupoksi walaupun adanya keterbatasan anggaran untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu.

B. Akuntabilitas Kinerja Keuangan Tahun 2020

Secara umum anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu berasal dari dua sumber yaitu APBD Provinsi Bengkulu dan APBN melalui dana dekonsentrasi Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. Selain itu Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu memberikan kontribusi pendapatan bidang perdagangan melalui layanan UPTD Balai Pengujian Mutu Barang dan Pelaksanaan Event Bengkulu Expo.

1. Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu pada tahun 2020 tidak ditargetkan mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari unit-unit penghasil yang ada di lingkungan Dinas Perindag Provinsi Bengkulu yaitu dari Balai Pembinaan dan Pengawasan Mutu Barang (BPPMB) karena masih direvisinya Perda provinsi yang mengatur untuk penarikan retribusi pengujian mutu barang

Tabel. 3.20 Capaian PAD Disperindag Provinsi Bengkulu.

No	Sumber/Unit Penghasil	Target	Realisasi	Capaian %
1	Balai Pembinaan dan Pengawasan Mutu Barang (BPPMB)	-	-	0
2	Penerimaan Lain2 (Penerimaan atas penerimaan Jasa)	-	-	0
	Total	-	-	%

Sumber: Sub Bagian Keuangan, Sekretariat - Disperindag Prov. Bengkulu

2. Realisasi Keuangan Tahun 2020

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu melaksanakan Program dan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2020 terdiri dari : Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 9.787.377.568 (Sembilan milyar tujuh ratus

delapan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu limaratus enam puluh delapan Rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp . 9.172.242.867,- (Sembilan milyar seratus tujuh puluh dua juta duaratus empat puluh dua ribu delapan ratus enam puluh tujuh Rupiah) atau sebesar 93,71 persen. Sedangkan untuk Belanja Langsung sebesar Rp.3.787.569.299.,- (Tiga milyar Tujuh ratus delapan puluh tujuh juta Lima ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah.) dengan realisasi anggaran sebesar Rp 3.521.086.617.,- (Tiga milyar lima ratus dua puluh satu juta delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh belas rupiah.) atau sebesar . 92,96 persen. Berikut ini rekapitulasi program dan kegiatan terdiri dari:

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase		Sisa Anggaran (Rp)
				Keu	Fisik	
A	Belanja Tidak Langsung	9.787.377.568	9.172.242.867	93,71	-	615.134.701
B	Belanja Langsung	3.787.569.299	3.521.086.617	92,96	1,81	266.482.682
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.699.995.600	1.551.712.473	91,27	-	148.243.127
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	157.705.699	148.104.815	93,91	21,53	9.600.884
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	144.827.100	134.661.039	92,98	-	10.166.061
4	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	51.500.000	47.654.200	92,53	-	2.345.800
5	Program peningkatan dan pengembangan Luar Negeri.	418.785.000	385.460.500	92,04	-	33.324.500
6	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	253.620.000	236.782.506	93,36	-	16.837.494
7	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	961.175.900	920.882.384	95,80	3,62	40.293.536
8	Program Pengembangan Industri Agro	100.000.000	92.616.500	92,61	-	7.383.500

Sumber : Subbagian Keuangan, Tahun 2020

Penjabaran Program dan Kegiatan:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.699.955.600,- realisasi anggaran sebesar Rp. 1.551.712.473,- atau 91,28 %. Output kegiatan adalah terlaksananya pemenuhan kebutuhan operasional dasar pelayanan administrasi perkantoran Dinas selama 1 tahun. Outcome kegiatan adalah pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu dengan alokasi anggaran sebesar Rp157.705.699,- realisasi anggaran sebesar Rp.148.104.815,- atau 93,91 %. Output kegiatan adalah jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang diadakan/dibangun/direhab/dipelihara. Outcome kegiatan adalah adanya pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu sebanyak 18 unit.

c. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kegiatan Perencanaan, Pelaporan dan pengelolaan informasi bidang Industri dan Perdagangan, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu dengan alokasi anggaran sebesar Rp 144.827.100,- realisasi anggaran sebesar Rp 134.661.039,-. atau 92,98.%. Output kegiatan adalah terlaksananya pengerjaan dan penyelesaian sejumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan pelaporan yang disusun. Outcome kegiatan adalah tercapainya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan sebanyak 10 dokumen.

d. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

Kegiatan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 51.500.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 50.866.400,- atau 92,53 %. Output kegiatan adalah tercapai nilai indeks kepuasan Konsumen. Outcome program ini belum tercapai sehubungan dengan direvisinya Perda Retribusi atas pengujian barang pada tahun 2020 yang

berdampak tidak tercapainya output program perlindungan konsumen dan perdagangan (nilai indeks kepuasan konsumen). Hal ini disebabkan tidak ada pelayanan pengujian sampel.

e. Program peningkatan dan pengembangan ekspor

Kegiatan peningkatan dan pengembangan ekspor yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 418.785.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 385.460.500,- atau 92,04.%. Output kegiatan adalah tercapainya Persentase Peningkatan Nilai Ekspor Provinsi Bengkulu. Outcome kegiatan ini belum terlaksana dengan baik karena belum mencapai target peningkatan dan pengembangan ekspor yang ditargetkan 16%, justru turun menjadi 20,5%.dari tahun sebelumnya.

f. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

Kegiatan peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 253.620.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 236.782,506,-. atau 93,36.%. Output kegiatan adalah tercapainya persentase pertumbuhan sub sektor perdagangan dalam negeri yang dilihat dari omzet perdagangan, Persentase pertumbuhan sub sektor perdagangan dalam negeri jumlah pedagang yang tumbuh di Provinsi Bengkulu, dan nilai koefisien kestabilan harga. Outcome kegiatan adalah tercapainya peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

g. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial

Kegiatan Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu hanya berbentuk kegiatan pembinaan kepada sentra sentra industry baik berupa adanya konsultasi ataupun arahan, dikarenakan pada tahun Anggaran 2020 Program ini tidak mendapat bagian anggaran , dikarenakan adanya pengalihan anggaran untuk penanganan wabah virus Covid 19.. Output kegiatan adalah Pembinaan dan Fasilitasi Industri Kecil Menengah (IKM) dalam pengembangan Dekranasda Provinsi Bengkulu. Outcome kegiatan adalah terbinanya dan terfasilitasinya Industri Kecil Menengah (IKM) dalam pengembangan Dekranasda Provinsi Bengkulu.

h. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Kegiatan pengembangan Industri Kecil dan Menengah yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 961.175.900,- realisasi anggaran sebesar Rp 920.882.384,- atau 95,80.%. Output kegiatan adalah persentase pertumbuhan unit industri kecil dan

menengah, persentase sentra industri yang dikembangkan dan persentase peningkatan nilai produksi kecil menengah. Outcome kegiatan adalah tercapainya program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dengan target 11.%.

i. Program Pengembangan Industri Agro

Kegiatan Program Pengembangan Industri Agro yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 92,616,500,- atau 92,61%. Output kegiatan adalah persentase pertumbuhan unit industri pengolahan non-migas sedang dan besar serta nilai investasi industri sedang dan besar Outcome kegiatan adalah tercapainya program pengembangan industri agro dengan 270 Milyar.

Dan untuk APBN Tahun Anggaran 2020 (Dekonsentrasi) sebesar Rp 2.642.278.000.- (Dua milyar Enam ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah.) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.634.125.500.- (Dua milyar Enam ratus tiga puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah..) atau sebesar 99,69 persen. Dengan Sisa lebih pelaksanaan anggaran (SILPA) sebesar Rp.8.152.500 (Delapan juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah.) atau sebesar 0,31 Persen. Adapun rincian program terdiri dari sebagai berikut:

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase		Sisa Anggaran (Rp)
				Keu	Fisik	
1	2	3	4	5	6	7
APBN						
1	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	631.997.000.	627.229.000.	99,25	100	4.768.000
2	Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri	236.591.000	233.678.000	98.77	100	2.913.000
3	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	1.773.690.000	1.773.218.500	99,97	100	471.500
Total		2.642.278.000	2.634.125.500	99,69	100	8.152.500

Sumber: Subbagian Keuangan, Tahun 2020

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Disperindag menuju *good governance* dengan mengacu pada Renstra Dinas Perindag Tahun 2016-2021. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengacu pada Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu lebih menitikberatkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, LAKIP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LAKIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

Sebagai Instansi yang bertugas membina dan mengembangkan sektor industri dan perdagangan telah mampu menjalankan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya. Hal ini tampak pada pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020, secara umum sudah dapat memenuhi target yang ditetapkan, walaupun masih terdapat beberapa Indikator Kinerja Utama yang belum dapat mencapai target yang ditetapkan.

Pencapaian atau realisasi terhadap target indikator kinerja utama (IKU) pada tahun 2020 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Sasaran ke-1: Dalam upaya Meningkatkan kontribusi sub sektor industri terhadap perekonomian daerah. Capaian kinerja sasaran ke-1 mendapat predikat baik dengan capaian rata-rata pada kategori Baik dengan rata – rata persentase capaian 99,10 persen. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran

sasaran ke-1 melalui indikator utama, menghasilkan 1 indikator dengan kategori baik.

2. Sasaran ke-2: Dalam upaya Meningkatnya Pertumbuhan Perdagangan Dalam Negeri terhadap perekonomian daerah. Capaian kinerja sasaran ke-2 mendapat predikat dengan capaian rata-rata pada kategori “Baik” dan rata – rata persentase capaian 96,06 persen. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran sasaran ke-2 melalui indikator utama, menghasilkan indikator dengan kategori “Baik”.
3. Sasaran ke-3: Dalam upaya Meningkatnya Capaian Kinerja OPD. Capaian kinerja sasaran ke-3 mendapat predikat dengan capaian rata-rata pada kategori Baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran melalui indikator, utama dengan kategori Baik.

4.2 Saran

1. Memfasilitasi percepatan penumbuhan kawasan industri di Provinsi Bengkulu, sehingga dengan terbangunnya kawasan industri di Provinsi Bengkulu diharapkan dapat mempermudah akses perijinan untuk mempercepat hilirisasi produk di Provinsi Bengkulu;
2. Memfasilitasi akses permodalan bagi wirausaha baru dan IKM unggulan dengan melakukan kerjasama dengan perbankan nasional/daerah, BUMN/BUMD dan instansi terkait permodalan usaha;
3. Memfasilitasi pengurusan akta notaris bagi kelompok usaha baru yang sudah dilatih agar dapat memberikan bantuan hibah mesin/peralatan produksi kepada wirausaha baru dan IKM di Provinsi Bengkulu
4. Melakukan pendampingan manajemen kewirausahaan bagi calon wirausaha baru agar dapat memiliki mental yang tangguh dalam memulai usaha.
5. Membangun sistem informasi sektor industri dan sektor perdagangan melalui pendekatan penggunaan teknologi informasi sehingga dapat menyajikan data secara komprehensif dan *real time* dan valid sesuai dengan kebutuhan informasi data. Selain itu juga melakukannya pemuktahiran data yang terintegrasi antara dinas perdagangan kabupaten/kota dengan provinsi terkait data informasi pasar maupun informasi industri sert data dukung lainnya;

6. Melatih petugas pendataan industri yang disiapkan untuk Kabupaten/Kota serta memaksimalkan fungsi penyuluh industri dalam melakukan pendampingan kepada sentra – sentra yang vakum atau berhenti produksi untuk kemudian difasilitasi jalan keluar dari kelangsungan produksi dan usaha IKM baik dalam bentuk modal dan bantuan peralatan/mesin;
7. Melakukan pembinaan dari aspek inovasi dan diversifikasi produk agar mendorong IKM yang kalah bersaing untuk maju dan berkembang dengan inovasi produk yang baru dan sesuai dengan selera pasar;
8. Optimalisasi Penyelenggaraan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan mempercepat proses pembentukan BPSK untuk memfasilitasi jumlah pengaduan konsumen. Jumlah BPSK yang terbentuk, dilakukan melalui Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Konsumen merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk membentuk dan menumbuh kembangkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang berperan dalam penyelesaian sengketa antara Pelaku Usaha dengan konsumen dilingkup pemerintah kabupaten/kota.
9. Perlu dilakukan kegiatan Fasilitasi Pengolahan Entry Data SIUP, TDP dan TDG untuk memperoleh data yang up to date terkait pendaftaran perusahaan dan perkembangan kegiatan usaha melalui penerbitan SIUP dan TDG, yang ada pada kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu sekaligus memperoleh informasi dan masukan terkait dengan permasalahan dan kondisi yang dihadapi oleh kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan pendaftaran perusahaan dan penerbitan SIUP maupun TDG sehingga dapat terwujud kesamaan persepsi dan pemahaman dalam memaknai maksud dan tujuan setiap pendataan SIUP, TDP dan TDG bagi perkembangan dunia usaha di daerah, khususnya di Bengkulu
10. Perlu diadakan sosialisasi dan pembinaan terkait penerapan sistem resi gudang. Kegiatan Sosialisasi Penerapan Sistem Resi Gudang dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang pemanfaatan sistem resi gudang sehingga mampu menciptakan/memperkuat daya tawar-menawar petani sekaligus menciptakan efisiensi di dunia agrobisnis, dimana petani bisa menunda penjualan komoditi setelah panen, sambil menunggu harga membaik kembali, dengan menyimpan hasil panen mereka di gudang-gudang tertentu yang telah memenuhi persyaratan.
11. Dalam rangka mendorong kinerja ekspor daerah dapat melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal lainnya dalam bentuk forum peningkatan kinerja ekspor Provinsi Bengkulu. Diharapkan dengan adanya forum

tersebut dapat memberikan jalan keluar bagi permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan kinerja ekspor dan neraca perdagangan Provinsi Bengkulu. Selanjutnya juga dilaksanakan konsultasi dengan Kementerian terkait dengan kewenangan yang ada pada Kementerian terkait dengan usulan perubahan peraturan dan perundang-undangan terutama yang berhubungan dengan PLBN di Provinsi Bengkulu. Selain itu Perlunya diadakan pelatihan dan pendampingan kegiatan Ekspor bagi para eksportir untuk pembuatan surat-surat izin ekspor serta lebih diarahkan untuk ekspor barang jadi seperti kopi bubuk sebagai salah satu produk unggulan daerah Provinsi Bengkulu, karena harga produk jadi ekportirlah yang menentukan, tidak dipengaruhi rate harga internasional seperti produk batubara dan CPO.

Bengkulu, Februari 2021
Plt.Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Bengkulu

SURYA OFIANA,SE. M.Si

Pembina TK I

Nip. 196710121992032001